

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TENTANG SISTEM BAGI
HASIL DALAM KERJA SAMA BUDI DAYA LEBAH MADU ANTARA
PEMODAL DENGAN PENGELOLA**

(Studi Pada Penangkaran Lebah Madu di Desa Tempel Rejo Kecamatan
Kedondong Kabupaten Pesawaran)

Skripsi

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat Guna
Mendapatkan Gelar Sarjana S1
Dalam Hukum Ekonomi Syari'ah

Oleh

Elin Dwi Pristiana

NPM 1721030184

Program Studi : Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)



**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1442 H / 2021 M**

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TENTANG SISTEM BAGI
HASIL DALAM KERJA SAMA BUDI DAYA LEBAH MADU ANTARA
PEMODAL DENGAN PENGELOLA**

(Studi Pada Penangkaran Lebah Madu di Desa Tempel Rejo Kecamatan
Kedondong Kabupaten Pesawaran)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum S1
Dalam Hukum Ekonomi Syari'ah

**Oleh
Elin Dwi Pristiana
NPM 1721030184**

Program Studi: Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Pembimbing I : Drs. Henry Iwansyah M.A

Pembimbing II : Herlina Kurniati., S. H.I., M.E.I

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1442 H / 2021 M**

ABSTRAK

Praktik kerja sama yang terjadi di Desa Tempel Rejo merupakan kerja sama yang dilakukan dalam bidang pengelolaan lahan yang dijadikan untuk budi daya lebah madu antara pemodal (*shahibul mal*) dengan pengelola (*mudharib*). Dimana pada akadnya pengelola mendapatkan bagian 40% dan Pemodal mendapat 60%. Sistem pembagian keuntungan seperti ini sudah menjadi kebiasaan bagi masyarakat di Desa Tempel Rejo. Pada kasus ini pemodal dengan pengelola melakukan kerja sama dalam mengelola lahan yang dijadikan untuk budi daya lebah madu, pemodal meminta pengelola agar tanah tersebut dijadikan untuk tempat pembudidayaan lebah madu, setelah pengelola menyelesaikan pekerjaannya tersebut, dan sudah memperoleh hasil panen, pengelola akan mendapatkan keuntungan 40% dari hasil panen tersebut. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana sistem bagi hasil dalam kerja sama budi daya lebah madu antara pemodal dengan pengelola di Desa Tempel Rejo Kecamatan Kedondong Kabupaten Pesawaran dan Bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang sistem bagi hasil dalam kerja sama budi daya lebah madu antara pemodal dengan pengelola di Desa Tempel Rejo Kecamatan Kedondong Kabupaten Pesawaran . Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami sistem bagi hasil dalam kerja sama budi daya lebah madu antara pemodal dengan pengelola di Desa Tempel Rejo Kecamatan Kedondong Kabupaten Pesawaran dan Untuk Mengetahui dan memahami Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah tentang sistem bagi hasil dalam kerja sama budi daya lebah madu antara pemodal dengan pengelola di Desa Tempel Rejo Kecamatan Kedondong Kabupaten Pesawaran . Metode penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*), yang bersifat deskriptif analisis, serta data-data yang diperoleh dari kepustakaan. Penelitian lapangan dilakukan untuk menghimpun data lapangan tentang kerja sama yang terjadi. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data melalui wawancara (*interview*). Dalam analisa datanya menggunakan metode kualitatif. Pengolahan data dilakukan melalui *editing*, dan *sistematis data*. Berdasarkan hasil penelitian ini dapat dikemukakan bahwa pelaksanaan bagi hasil dalam kerja sama yang terjadi di Desa Tempel Rejo adalah pembagian keuntungan yakni 60% untuk pemodal dan 40% untuk pengelola. Akan tetapi pada praktiknya pembagian keuntungan tersebut tidak sesuai dengan apa yang ada di akad awal. Praktiknya pembagian keuntungan setelah hasil panen terjadinya kerugian yang harus ditanggung oleh pengelola, yang mengakibatkan pembagian hasil nya berbeda dari akad di awal, yaitu pengelola hanya mendapatkan bagian 30% dan pemodal mendapatkan 70%. Dalam hal ini praktik kerja sama yang terjadi di Desa Tempel Rejo Kecamatan Kedondong Kabupaten Pesawaran merupakan kerja sama yang tidak sah dan dilarang oleh Islam, berdasarkan ayat Al-quran Surat An-Naml:14, karena dalam pembagian keuntungannya tidak seperti yang diakadkan di awal.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Elin Dwi Pristiana

NPM : 1721030184

Jurusan/Prodi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TENTANG SISTEM BAGI HASIL DALAM KERJA SAMA BUDIDAYA LEBAH MADU ANTARA PEMODAL DENGAN PENGELOLA (Studi Pada Penangkaran Lebah Madu di Desa Tempel Rejo Kecamatan Kedondong Kabupaten Pesawaran)”** adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam footnote atau daftar pustaka. Apabila dilain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada menyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 14 Februari 2021

Penulis



Elin Dwi Pristiana
NPM. 1721030184



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH**

Alamat : Jl.Letkol. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung. Telp: (0721) 703260

PERSETUJUAN

**Judul Skripsi : TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TENTANG
SISTEM BAGI HASIL DALAM KERJA SAMA BUDI
DAYA LEBAH MADU ANTARA PEMODAL DENGAN
PENGELOLA (Studi Pada Penangkaran Lebah Madu di
Desa Tempel Rejo Kecamatan Kedondong Kabupaten
Pesawaran)**
Nama : Elin Dwi Pristiana
NPM : 1721030184
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Fakultas : Syari'ah

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosahkan dan dipertahankan dalam sidang Munaqosah Fakultas
Syari'ah UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Drs. Henry Iwansyah, M.A.
NIP.195812071987031003

Pembimbing II

Herlina Kurniati, S.H.I., M.E.I.

Ketua

Prodi Hukum Ekonomi Syariah

Khoiruddin, M.S.I

NIP. 197807252009121002



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat : Jl.Letkol. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung. Telp. (0721) 703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **“TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TENTANG SISTEM BAGI HASIL DALAM KERJA SAMA BUDI DAYA LEBAH MADU ANTARA PEMODAL DENGAN PENGELOLA”** (Studi Pada Penangkaran Lebah Madu di Desa Tempel Rejo Kecamatan Kedondong Kabupaten Pesawaran) disusun oleh, Elin Dwi Pristiana, NPM: 1721030184, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), Telah diujikan dalam sidang Munaqosyah di Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal : Selasa, 16 Maret 2021.

TIM PENGUJI

Ketua : Marwin, S.H., M.H.

Sekretaris : Arif Fikri, S.H.I., M.Ag.

Penguji I : Dr. H. A. Kumedi Ja'far, S.Ag. M.H.

Penguji II : Drs. Henry Iwansyah, M.A.

Penguji III : Herlina Kurniati, S.H.I., M.E.I.

**Mengetahui
Fakultas Syari'ah**



Dr. H. Khoiruddin, M.H.
NIP.1962102119930310002

MOTTO

كَانَ سَيِّدُنَا الْعَبَّاسُ يُنْعِبُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ إِذَا دَفَعَا لِمَا لَمْ يَضَارِبْهُ اشْتَرَطَ عَلَى صَاحِبِهَا أَنْ لَا يَسْلُكَ بِهِ بَحْرًا، وَلَا يَنْزِلَ بِهَا
دِيًّا، وَلَا يَشْتَرِيَ بِهَا بَنَةً ذَاتَ كَيْدٍ رَطْبَةٍ، فَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ كَضَمِنَ، فَبَلَغَ عَشْرَ طُهُرٍ سَوَالٍ لِلَّهِ صَلَّاءٌ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ

جَازُهُ (رواه الطبراني في المعجم الأوسط عن ابن عباس)

“Abbas bin Abdul Muthallib jika menyerahkan harta sebagai mudharabah, ia mensyaratkan kepada mudharib-nya agar tidak mengarungi lautan dan tidak menuruni lembah, serta tidak membeli hewan ternak.

Jika persyaratan dilanggar, ia (mudharib) harus mengganggu resikonya. Ketika persyaratanyang ditetapkan Abbas itu didengar Rasulullah, beliau membenarkannya.”

(HR. Thabrani dari Ibnu Abbas)



PERSEMABAHAN

Alhamdulillahirobbil'alamin. Dengan menyebut nama Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa, penuh cinta kasihnya yang telah memberikan saya kekuatan, dan telah menuntun dalam menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini saya persembahkan untuk :

1. Ayahku Bapak Sunarno dan Ibuku tercinta Ibu Rubi Waheni, terima kasih yang tak terhingga ayah, ibu atas do'a, semangat, dukungan, kesabaran, nasihat dan kasih sayang yang kalian berikan, semoga Allah selalu memberikan nikmat-Nya, kepada ayah dan ibu.
2. Kakakku Rio Pratama dan Istrinya Pera Gustina serta keponakanku Muhammad Sakha Abhiseva.
3. Terima kasih kepada Rahmat Kesuma Yudha yang telah memberi dukungan dan motivasi serta saran yang membangun, sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini dengan bahagia.
4. Almamaterku tercinta Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang sangat saya banggakan, akan selalu saya jaga nama baiknya.

RIWAYAT HIDUP

Nama lengkap Elin Dwi Pristiana. Putri kedua dari Bapak Sunarno dan Ibu Rubi Waheni. Saya dilahirkan pada tanggal 27 September 1999 di Desa Banjarsari Kecamatan Wonosobo Kabupaten Tanggamus. Adapun pendidikan yang telah dicapai adalah sebagai berikut:

1. Sekolah Dasar Negeri (SDN) 1 Banjarsari Kecamatan Wonosobo Kabupaten Tanggamus selesai pada tahun 2011
2. Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 2 Wonosobo selesai pada tahun 2014
3. Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 1 Bandar Lampung selesai pada tahun 2017
4. Selanjutnya pada tahun 2017 mengikuti pendidikan program Strata satu (S1) pada Fakultas Sya'riah Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung.



Bandar Lampung, 14 Februari 2021

Elin Dwi Pristiana

KATA PENGANTAR

Bismilla hirohmanirrohim

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah S.W.T yang telah mencurahkan karunia dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang sederhana ini, sebagai persyaratan ujian munaqasah guna memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Fakultas Syari'ah prodi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung.

Shalawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada Nabi Muhammad S.A.W sebagai pemimpin risyalah untuk menyelamatkan kehidupan umat manusia baik dunia maupun akhirat. Skripsi ini berjudul : **“TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TENTANG SISTEM BAGI HASIL DALAM KERJA SAMA BUDI DAYA LEBAH MADU ANTARA PEMODAL DENGAN PENGELOLA”**(Studi Pada Penangkaran Lebah Madu di Desa Tempel Rejo Kecamatan Kedondong Kabupaten Pesawaran) dapat diselesaikan.

Adapaun tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan program sarjana, guna memperoleh gelar Sarjana Strata satu (S1) jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Sya'riah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Selanjutnya untuk keberhasilan itu penulis tidak lupa mengucapkan ribuan terima kasih yang sebesar-besarnya dan setulusnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Muhammad Mukri, M.Ag, selaku Rektor Uin Raden Intan Lampung yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di kampus tercinta ini;

2. Bapak Dr. KH. Khoiruddin Tahmid, M.H. selaku Dekan Fakultas Sya'riah UIN Raden Intan Lampung yang senantiasa tanggap terhadap kesulitan-kesulitan mahasiswa dan mahasiswi;
3. Bapak Khoiruddin, M.S.I dan Ibu Juhrotul Khulwah, M.S.I. selaku ketua jurusan dan sekretaris jurusan Mu'amalah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung;
4. Bapak Drs. Henry Iwansyah M.As selaku pembimbing Akademik sekaligus pembimbing I dan Ibu Herlina Kurniati., S. H.I., M.E.I selaku pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu untuk membantu dan membimbing, serta memberikan arahan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
5. Dosen-dosen Fakultas Sya'riah dan segenap Tenaga Kependidikan UIN Raden Intan Lampung.
6. Kepala kepastakaan UIN Raden Intan Lampung dan pengelola perpustakaan yang telah memberikan informasi, data, referensi dan lain-lain;
7. Bapak Ibu Guru semasa berada di sekolah SD, SMP, MAN yang telah memberikan ilmu pengetahuan;
8. Motivator yang telah memberiku semangat, menemani, membantu dalam proses penyelesaian skripsi ini, Rahmat Kesuma Yudha;
9. Teman-teman KKN, PPS dan seluruh teman-teman yang telah memberikan dukungan serta kesan terbaik selama berada di Kampus UIN Raden Intan Lampung.
10. Sahabat-sahabatku, Riska Angraini, Salsabilla Safitri, Pebi Puspitasari, Shynthya Aishyah Elsylianno. Terimakasih atas segala dukungan, motivasi,

serta semangat dan perhatian yang sangat luar biasa yang kalian berikan kepada penulis;

Bandar Lampung, 14 Februari 2021

Elin Dwi Pristiana



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iv
PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR.....	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul	1
B. Alasan Memilih Judul	3
C. Latar Belakang Masalah.....	3
D. Fokus Masalah	6
E. Rumusan Masalah	6
F. Tujuan Penelitian	7
G. Signifikasi Penelitian	8
H. Metode Penelitian.....	9

BAB II LANDASAN TEORI

A. Kajian Teori.....	14
1. Pengertian <i>Mudharabah</i>	14
2. Dasar Hukum <i>Mudharabah</i>	18
3. Rukun dan Syarat <i>Mudharabah</i>	26
4. Macam-macam <i>Mudharabah</i>	32
5. Prinsip-prinsip <i>Mudharabah</i>	37
6. Hak dan Kewajiban Pengelola	39
7. Kedudukan <i>Mudharabah</i>	42
8. Hal-hal yang membatalkan <i>Mudharabah</i>	43
9. Manfaat dan Hikmah <i>Mudharabah</i>	46
B. Tinjauan Pustaka	49

BAB III LAPORAN HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	52
1. Sejarah Singkat Desa Tempel Rejo Kecamatan Kedondong Kabupaten Pesawaran.....	52

2. Kondisi Geografis dan Administratif Desa Tempel Rejo Kecamatan Kedondong Kabupaten Pesawaran	53
3. Kondisi Demografis Desa Tempel Rejo Kecamatan Kedondong Kabupaten Pesawaran	54
4. Kondisi Sosial dan Ekonomi Desa Tempel Rejo Kecamatan Kedondong Kabupaten Pesawaran	55
5. Struktur Organisasi Pemerintah Desa Tempel Rejo Kecamatan Kedondong Kabupaten Pesawaran	57
6. Visi dan Misi Desa Tempel Rejo Kecamatan Kedondong Kabupaten Pesawaran.....	60
B. Deskripsi Data Penelitian.....	61
1. Sistem Bagi Hasil Dalam Kerja Sama Budi daya Lebah Madu di Desa Tempel Rejo Kecamatan Kedondong Kabupaten Pesawaran.....	61
BAB IV ANALISIS DATA	
1. Sistem Bagi Hasil Dalam Kerja Sama Budi daya Lebah Madu Antara Pemodal dengan Pengelola di Desa Tempel Rejo Kecamatan Kedondong Kabupaten Pesawaran.....	66
2. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Sistem Bagi Hasil Dalam Kerja Sama Budi daya Lebah Madu Pada Penangkaran Lebah Madu di Desa Tempel Rejo Kecamatan Kedondong Kabupaten Pesawaran.....	69
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	73
B. Rekomendasi.....	75
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Jumlah Penduduk Desa Tempel Rejo.....	54
Tabel 2	Topologi Desa Tempel Rejo.....	55
Tabel 3	Tingkat Pendidikan Masyarakat Desa Tempel Rejo.....	56
Tabel 4	Mata Pencarian Penduduk Desa Tempel Rejo.....	56
Tabel 5	Tenaga Medis Kesehatan.....	57
Tabel 6	Kelembagaan Desa Tempel Rejo.....	57
Tabel 7	Potensi Sarana dan Prasarana.....	59



DAFTAR GAMBAR

Gambar I	Struktur Organisasi Pemerintah Desa Tempel Rejo Kecamatan Kedondong Kabupaten Pesawaran.....	58
----------	---	----



DAFTAR LAMPIRAN

1. Blangko Konsultasi
2. Surat Rekomendasi Penelitian dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Lampung
3. Surat Keterangan Turnitin
4. Hasil Wawancara
5. Dokumentasi Foto Penelitian



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebagai kerangka awal guna mendapatkan gambaran yang jelas dan memudahkan dalam memahami skripsi ini maka perlu adanya uraian terhadap penegasan arti dan makna dari beberapa istilah yang terkait dengan judul skripsi ini. Dengan penegasan judul tersebut diharapkan tidak akan terjadi kesalahpahaman terhadap pemaknaan judul dari beberapa istilah yang digunakan, disamping itu langkah ini merupakan proses penekanan terhadap pokok permasalahan yang akan dibahas, maka akan diuraikan secara singkat kata kunci yang terdapat didalamnya yang berjudul **“TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TENTANG SISTEM BAGI HASIL DALAM KERJA SAMA BUDI DAYA LEBAH MADU ANTARA PEMODAL DENGAN PENGELOLA” (Studi Pada Penangkaran Lebah Madu di Desa Tempel Rejo Kecamatan Kedondong Kabupaten Pesawaran).**

Berikut ini adalah istilah-istilah yang perlu dijelaskan untuk menghindari kerancuan dalam memahami judul skripsi ini :

1. Hukum Islam adalah seperangkat aturan yang berdasarkan wahyu Allah dan Sunnah Rosul tentang tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan diyakini berlaku serta mengikat untuk semua ummat yang beragama Islam.¹

¹ Ismail Muhammad Syeh, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta:Bumi Aksara.1999), 17

2. Kerja sama secara etimologis berasal dari kata ikhtilat yang bermakna percampuran atau kemitraan antara beberapa mitra atau perseroan. Yang dimaksud percampuran di sini adalah seseorang mencampurkan hartanya dengan harta orang lain sehingga sulit untuk dibedakan.²
3. Budi daya merupakan kegiatan terencana pemeliharaan sumber hayati yang dilakukan pada suatu areal lahan untuk diambil manfaat atau hasil panen nya. Kegiatan budi daya dapat dianggap sebagai inti dari usaha tani.³ Menurut Kamus lengkap Bahasa Indonesia, budi daya adalah memperguna, memanfaatkan usaha, memanfaatkan sesuatu.⁴

Budi daya yang penulis maksud di sini ialah suatu kegiatan terencana pemeliharaan hewan lebah yang dapat menghasilkan madu dengan proses pengelolaannya disuatu areal lahan di desa Tempel Rejo Kecamatan Kedondong Kabupaten Pesawaran.

4. Madu adalah cairan alamiah yang banyak mengandung zat gula yang dihasilkan oleh lebah (genius apis) dari nektar bunga dan rasanya manis.⁵

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa maksud judul skripsi ini adalah suatu sistem bagi hasil dalam kerja sama budi daya lebah madu ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah.

² Ismail Nawawi, *Fiqh Muamalah Hukum Ekonomi Bisnis dan Sosial*, (Surabaya : Putra Media Nusantara, 2010), 242

³<http://kbbi.web.id/budidaya>, diakses 16 Juni 2020.

⁴ Tri Rama, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Surabaya : Karya Agung, 2016) 99.

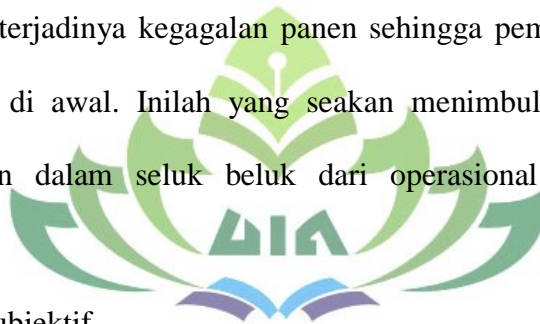
⁵<http://id.m.wikipedia.org/wiki/Madu>, diakses 16 Juni 2020.

B. Alasan Memilih Judul

Adapun alasan memilih judul skripsi tinjauan hukum ekonomi syariah tentang sistem bagi hasil dalam kerja sama budi daya lebah madu antara pemodal dengan pengelola adalah sebagai berikut :

1. Alasan Objektif

Bahwa telah terjadi praktik kerja sama budi daya madu antara pemodal dengan pengelola di Desa Tempel Rejo Kecamatan Kedondong Kabupaten Pesawaran pada praktik kerja sama ini telah terjadinya pembagian hasil yang tidak sesuai dengan perjanjian lisan yang dibuat di awal hal itu dikarenakan terjadinya kegagalan panen sehingga pembagian hasilnya tidak seperti akad di awal. Inilah yang seakan menimbulkan samar-samar dan ketidakjelasan dalam seluk beluk dari operasional maupun mekanisme kerjanya.



2. Alasan Subjektif

- a. Pembahasan ini memiliki relevansi dengan disiplin ilmu yang direkuni oleh penulis yaitu jurusan hukum ekonomi syariah (Muamalah), Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
- b. Tersedianya literatur yang menunjang, maka sangat memungkinkan untuk dilakukan penelitian
- c. Lokasi penelitian yang mudah untuk diteliti

C. Latar Belakang Masalah

Manusia merupakan makhluk sosial yang tidak akan bisa hidup tanpa bantuan orang lain dalam mencukupi kebutuhan hidup. Artinya bahwa

manusia tersebut tidak akan dapat bertahan hidup tanpa adanya interaksi dengan makhluk lain. Manusia yang memiliki sifat ketergantungan antara sesama manusia umumnya meliputi segala aspek kehidupan terutama dalam hal perjanjian dan kontrak. Unsur ketergantungan inilah yang akan membuat manusia akan saling membutuhkan antara satu dengan yang lainnya.⁶ Dalam hal ini contohnya adalah kerja sama seperti yang terjadi di desa Tempel Rejo Kecamatan Kedondong Kabupaten Pesawaran.

Islam membolehkan kepada para pemilik modal untuk mengadakan *Syirkah* dalam usaha, baik berupa perusahaan, perdagangan, dan sebagainya. Sebab diantara para pemilik modal membutuhkan banyak pikiran, tenaga dan moral. Sedang seseorang itu dinilai kecil apabila sendirian, tetapi dinilai besar apabila bersama yang lain. Dalam hal ini manusia tidak biasa melakukan sendiri, tidak jarang mereka membutuhkan bantuan orang lain dalam melakukan usaha tersebut.⁷

Desa Tempel Rejo Kecamatan Kedondong Kabupaten Pesawaran sebagian masyarakatnya bermata pencaharian sebagai petani. Dalam hal ini, masyarakat Desa Tempel Rejo ada yang menggunakan modal sendiri, tetapi banyak juga yang bekerjasama dengan pemodal dalam mendapatkan modal untuk melakukan kegiatan budi daya lebah madu. Pemodal di sini bersifat perorangan yaitu dari warga masyarakat yang mempunyai modal untuk diberikan kepada pengelola yang membutuhkan modal. Kerja sama yang

⁶ Maulana Hasanudin, *Perkembangan Akad Musharakah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), 102

⁷Fathurrahman Djamil, *Penerapan Hukum Perjanjian Dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 155

dilakukan oleh pemodal dengan pengelola di Desa Tempel Rejo menggunakan akad *mudharabah*. Secara singkat dapat dijelaskan bahwa pemodal menyerahkan sejumlah modal kepada pengelola untuk memulai usaha budi daya lebah madu. Berdasarkan keadaan seperti ini saling membantu dan kerja sama, untuk menghasilkan lebih banyak keuntungan yang dikelola sehingga dapat menguntungkan keduanya baik pemodal maupun pengelolanya.

Dalam hal ini praktik kerja sama budi daya lebah madu yang dilakukan pemodal dengan pengelola di Desa Tempel Rejo atas dasar kesepakatan lisan tanpa adanya perjanjian tertulis. Terdapat banyak seluk beluk permasalahan yang timbul pada operasional kerjasamanya. Yang menyebabkan terjadinya pembagian hasil yang tidak sesuai dengan perjanjian lisan yang dibuat di awal hal itu dikarenakan terjadinya kegagalan panen sehingga pembagian hasilnya tidak seperti akad di awal. Inilah yang seakan menimbulkan samar-samar dan ketidakjelasan dalam seluk beluk dari operasional maupun mekanisme kerjanya.

Oleh karena itu, penulis tertarik untuk meneliti apakah pelaksanaan praktik kerja sama budi daya lebah madu antara pemodal dengan pengelola pada penangkaran lebah madu di Desa Tempel Rejo Kecamatan Kedondong Kabupaten Pesawaran, telah sesuai dengan Hukum Islam. Karena praktik kerja sama tersebut pembagian hasilnya tidak sesuai dengan akad di awal antara pemodal dengan pengelola.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis bermaksud untuk meneliti hal tersebut dengan judul **“TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TENTANG SISTEM BAGI HASIL DALAM KERJA SAMA BUDI DAYA LEBAH MADU ANTARA PEMODAL DENGAN PENGELOLA”** (Studi Pada Penangkaran Lebah Madu Desa di Tempel Rejo Kecamatan Kedondong Kabupaten Pesawaran).

D. Fokus Penelitian

Dalam sebuah penelitian atau *research* yang bertujuan untuk mencari sesuatu hal yang baru, peneliti akan terlebih dahulu membuat fokus penelitian pada suatu objek yang akan diteliti. Setelah fokus penelitian ditentukan, maka selanjutnya akan ditetapkan rumusan masalah dan tujuan penelitian.⁸

Adapun fokus penelitian dalam proposal ini adalah terletak pada sistem bagi hasil dalam kerja sama budi daya madu antara pemodal dengan pengelola, dan akan ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah. Adapun alamat atau tempat penelitian yaitu beralamatkan di Desa Tempel Rejo Kecamatan Kedondong Kabupaten Pesawaran.

E. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan beberapa pokok permasalahan yang selanjutnya akan menjadi objek pembahasan. Adapun rumusan masalahnya adalah sebagai berikut :

⁸ Susiadi, *Pedoman Penulisan Skripsi*, (Bandar Lampung: pusat penelitian dan penerbitan LP2M Institusi Agama Islam Negeri Raden Intan Laampung, 2015), 95.

1. Bagaimana sistem bagi hasil dalam kerja sama budi daya lebah madu antara pemodal dengan pengelola di Desa Tempel Rejo Kecamatan Kedondong Kabupaten Pesawaran?
2. Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah tentang sistem bagi hasil dalam kerja sama budi daya lebah madu antara pemodal dengan pengelola di Desa Tempel Rejo Kecamatan Kedondong Kabupaten Pesawaran?

F. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah, maka dapat diketahui bahwa tujuan dari penelitian ini sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui dan memahami sistem bagi hasil dalam kerja sama budi daya lebah madu antara pemodal dengan pengelola di Desa Tempel Rejo Kecamatan Kedondong Kabupaten Pesawaran
- b. Untuk mengetahui dan memahami Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah tentang sistem bagi hasil dalam kerja sama budi daya lebah madu antara pemodal dengan pengelola di Desa Tempel Rejo Kecamatan Kedondong Kabupaten Pesawaran

2. Kegunaan Penelitian

Hal terpenting dari sebuah penelitian adalah kemanfaatan yang dapat dirasakan atau diterapkan setelah diketahui hasil penelitian. Adapun kegunaan dan manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Secara Teoritis

Penelitian ini sebagai upaya untuk memberikan pengetahuan serta pemahaman sehingga dapat memberikan sumbangan pemikiran dan pengetahuan teruntuk kalangan umat muslim serta para sarjana hukum Islam khususnya tentang bermuamalah.

b. Secara Praktis

- 1) Penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai acuan yang dapat memberikan informasi tentang tinjauan hukum ekonomi syariah mengenai sistem bagi hasil dalam kerja sama budi daya lebah madu di Desa Tempel Rejo Kecamatan Kedondong Kabupaten Pesawaran.
- 2) Penelitian ini dimaksudkan sebagai suatu syarat memenuhi tugas akhir, guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dengan ilmu Syariah di fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

G. Signifikasi Penelitian

Berdasarkan pada latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan penelitian, maka peneliti berharap penelitian tentang Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Sistem Bagi Hasil Dalam Kerja sama Budi daya Lebah Madu Antara Pemodal Dengan Pengelola di Desa Tempel Rejo Kecamatan Kedondong Kabupaten Pesawaran, dapat bermanfaat atau berguna baik secara teoritis maupun praktis. Adapun signifikasi penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Signifikansi secara teoritis, hasil penelitian diharapkan dapat bermanfaat bagi seluruh masyarakat, baik yang terlibat dalam pelaksanaan sistem bagi hasil dalam kerja sama budi daya lebah madu, serta mampu memberikan pemahaman sesuai hukum Islam.
2. Signifikansi secara praktik, penelitian ini dapat dijadikan sebagai pedoman hukum, supaya tidak terjadi penyimpangan-penyimpangan atas peraturan yang berlaku di dalam hukum Islam maupun hukum positif yang berkenaan dengan kemaslahatan umum. Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi masyarakat untuk lebih teliti, khususnya Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu kegiatan ilmiah yang dilakukan secara bertahap dimulai dengan penentuan topik, serta pengumpulan data dan menganalisis data, sehingga nantinya diperoleh suatu pemahaman dan pengertian atas topik, gejala, atau isu tertentu. Dalam hal ini penulis memperoleh data dari penelitian lapangan langsung tentang sistem bagi hasil dalam kerja sama budi daya lebah madu antara pemodal dengan pengelola di Desa Tempel Rejo Kec. Kedondong Kab. Pesawaran.

Adapun langkah-langkah tersebut adalah sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian dan Sifat Penelitian

- a. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*) yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data dari lokasi

atau lapangan tempat penelitian. Penelitian ini juga menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang dilaksanakan dengan menggunakan literatur (kepustakaan), baik berupa buku, catatan, maupun laporan hasil penelitian dari penelitian terdahulu. Penelitian lapangan dimaksudkan untuk mempelajari secara intensif latar belakang keadaan dan posisi saat ini.⁹

b. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yaitu jenis penelitian yang menggambarkan suatu permasalahan atau hasil penelitian secara objektif, tepat dan peka terhadap gejala yang terjadi pada individu atau kelompok tertentu.¹⁰

2. Sumber Data

a. Data Primer

Sumber data primer yaitu data yang diambil langsung dari responden atau objek yang diteliti. Sumber data yang utama yaitu bersumber dari pengelola yang bekerja sebagai petani madu.

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder yaitu data yang diambil dan diperoleh melalui pihak lain, tidak langsung dari subjek penelitiannya, peneliti menggunakan data ini sebagai data pendukung yang berhubungan dengan penelitian.

⁹ Aji Damanuri, *Metodologi Penelitian Muamalah* (Ponorogo: STAIN Po PRESS, 2010), 6.

¹⁰ Hadi Sutrisno, *Metode Research*, (Jakarta: Fakultas Psikologi UGM, 1994), 142.

3. Populasi

Populasi yaitu keseluruhan yang diambil dari obyek pengamatan atau obyek penelitian. Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pemodal dan pengelola budi daya madu berjumlah 47 orang, yaitu 6 orang pemodal dan 41 pengelola di Desa Tempel Rejo Kec. Kedondong Kab. Pesawaran. Karena penelitian ini kurang dari 100 maka penulis akan menjadikan keseluruhan populasi sebagai objek penelitian.

4. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan prosedur yang sistematis standar untuk memperoleh data yang diperlukan. Dalam penelitian ini, pengumpulan data menggunakan beberapa metode, yaitu :

a. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data melalui proses tanya jawab secara lisan, dimana dua orang atau lebih saling berhadapan secara fisik yang diarahkan pada pokok permasalahan tertentu. Wawancara dilakukan dengan pemodal dan pengelola madu di Desa Tempel Rejo Kec. Kedondong Kab. Pesawaran.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan pada subjek peneliti, namun melalui dokumen.¹¹ Metode ini merupakan suatu cara untuk mendapatkan data-data

¹¹ Sutrisno, *Metodelogi Research Kulitatif*, (Bandung: R&D, 2009), 240.

dengan mendata arsip dokumentasi yang diambil ditempat atau objek yang sedang diteliti.

5. Metode Pengolahan Data dan Metode Analisis Data

a. Metode Pengolahan Data

Pengolahan data dapat berarti menimbang, menyaring, mengatur, serta mengklarifikasikan. Dalam menimbang dan menyaring data, benar-benar memilih secara hati-hati data yang relevan dan tepat serta berkaitan dengan masalah yang diteliti sementara mengatur dan mengklarifikasi dilakukan dengan menggolongkan, menyusun menurut aturan tertentu. Yang berfungsi untuk mengolah data-data yang telah dikumpulkan, penulis menggunakan tahapan-tahapan sebagai berikut :

- 1) Editing atau pemeriksaan yaitu mengoreksi apakah data yang terkumpul sudah cukup lengkap dan sudah benar atau sesuai dengan masalah.
- 2) Klarifikasi adalah penggolongan data-data sesuai dengan jenis dan penggolongannya setelah diadakan pengecekan data.
- 3) Interpretasi yaitu memberikan penafsiran terhadap hasil untuk menganalisis dan menarik kesimpulan dari data.
- 4) Sistematisasi yaitu melakukan pengecekan terhadap data-data dan bahan-bahan yang telah diperoleh secara sistematis yang terarah dan berurutan sesuai dengan klarifikasi data yang diperoleh.¹²

¹² Noer Saleh, *Pedoman Membuat Skripsi*, (Jakarta: Gunung Agung, 1989), 16.

b. Metode Analisis Data

Setelah data terhimpun melalui penelitian, selanjutnya data dapat dianalisis secara kualitatif, yaitu merupakan suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tulisan atau lisan orang-orang yang berperilaku yang dapat dimengerti. Kemudian dianalisis menggunakan metode berfikir induktif, yaitu metode yang mempelajari suatu gejala yang khusus untuk mendapatkan kaidah-kaidah yang berlaku di lapangan yang lebih umum mengenai fenomena yang diteliti.

Metode ini digunakan dalam membuat kesimpulan tentang berbagai hal yang berkenaan tentang sistem bagi hasil dalam kerja sama budi daya lebah madu antara pemodal dengan pengelola ini tidak ada kontrak tertulis baik dalam menanggung kerugian maupun pembagian hasil yang setimpal. Apabila terdapat kerugian hasil budidaya madu maka pengelola pun ikut menanggung kerugian tersebut, padahal tidak ada ketentuan atau aturan baku yang dapat membuktikannya. Inilah yang seakan menimbulkan samar-samar dan tidak jelas dalam seluk beluk dari operasional maupun mekanisme kerjanya.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Kajian Teori

1. Pengertian *Mudharabah*

Mudharabah adalah akad yang dikenal oleh umat Muslim sejak zaman nabi, bahkan telah dipraktikkan oleh bangsa Arab sebelum turunnya Islam. Ketika Nabi Muhammad Saw. berprofesi sebagai pedagang, ia melakukan akad *mudharabah* dengan Khadijah.¹ *Mudharabah* atau *qiradh* termasuk salah satu bentuk akad *syirkah* (perkongsian). Istilah *mudharabah* digunakan oleh orang Irak, sedangkan orang Hijaz menyebutnya dengan istilah *qiradh*. Dengan demikian, *mudharabah* dan *qiradh* adalah dua istilah untuk maksud yang sama.²

Menurut bahasa, *mudharabah* diambil dari kalimat *dharaba fi ardh*. Artinya, melakukan perjalanan dalam rangka berdagang. *Mudharabah* dinamakan pula dengan *qiradh* yang berasal dari kata *al-qardh*. Artinya, potongan karena pemilik harta memotong sebagian hartanya untuk diperdagangkan dan mendapat sebagian dari keuntungannya.³ Secara terminologi *mudharabah* adalah menyerahkan harta yang tertukar kepada orang yang akan memutarnya dalam perdagangan dengan mendapatkan sebagian dari labanya.⁴ Secara etimologis *mudharabah* mempunyai arti

¹ Adiwarman A. Karim, *Bank Islam* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2010), h.204.

² Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), h.223.

³ Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2017), h.205.

⁴ Shalih Bin Fauzan Bin Abdullah Al-Fauzan, *Ringkasan Fiqh Lengkap*, (Jakarta: Darul Falah, 2005), h.614.

berjalan di atas bumi yang bisa diartikan berpergian, hal ini sesuai dengan firman Allah dalam QS. An Nisa ayat 101.

وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ

Artinya: “Dan apabila kamu berpergian di Muka bumi, maka tidaklah berdosa kamu men-qashar sholat.”⁵

Secara teknis, *mudharabah* adalah akad kerja sama antara dua pihak di mana pihak pertama *shahibul mal* menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian pengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian pengelola, maka pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.⁶

Menurut Hanafiyah, *mudharabah* adalah memandang tujuan dua pihak yang berakad yang berserikat dalam keuntungan (laba) karena harta diserahkan kepada yang lain dan yang lain punya jasa mengelola harta itu. Maka *mudharabah* atau *qiradh* ialah akad antara pemilik modal (harta) dengan pengelola harta tersebut, dengan syarat bahwa keuntungan diperoleh kedua belah pihak sesuai dengan jumlah kesepakatan.⁷

Zuhaily mengemukakan, *mudharabah* adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak, pihak pertama bertindak sebagai pemilik dana (*shahibul*

⁵ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2012), h.195.

⁶ M. Syafe'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), h.95.

⁷ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008), h.138.

mal) yang menyediakan seluruh modal, dan pihak kedua sebagai pengelola usaha (*mudharib*). Keuntungan yang didapatkan dari akad *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak dan biasanya dalam bentuk presentase (*nisbah*).⁸

Hasbi Ash Shiddieqy mengatakan bahwa *mudharabah* adalah semacam syarikad akad, bermufakat dua orang padanya dengan ketentuan : modal dari satu pihak, sedangkan usaha menghasilkan keuntungan dari pihak yang lain, dan keuntungan-keuntungan dibagi antara mereka.⁹

Kasmir mengemukakan, bahwa *mudharabah* merupakan akad kerja sama antara dua pihak, dimana pihak pertama menyediakan seluruh modal dan pihak lain menjadi pengelola. Keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak. Apabila rugi, maka akan ditanggung pemilik modal.¹⁰

Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor : 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *mudharabah (qiradh)*, pengertian *mudharabah* adalah pembiayaan yang disalurkan oleh LKS kepada pihak lain untuk usaha yang produktif. Selanjutnya, pada point kedua dalam Fatwa 07/DSN-MUI/IV/2000 juga menjelaskan bahwa dalam pembiayaan *mudharabah* LKS sebagai *shahibul mal* (pemilik dana) membiayai 100%

⁸ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), h.141.

⁹ Hasbi Ash Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), h.90.

¹⁰ Kamsir, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), h.6.

kebutuhan suatu proyek (usaha), sedangkan pengusaha (nasabah) bertindak sebagai *mudharib* atau pengelola usaha.¹¹

Mudharabah berdasarkan ahli fiqh merupakan suatu perjanjian yang seseorang memberikan hartanya kepada orang lain berdasarkan prinsip dagang dan keuntungan yang diperoleh akan dibagi berdasarkan kesepakatan yang telah disetujui di awal.¹² *Mudharabah* diambil dari lafaz *al-Drarb fi al-ard* yaitu perjalanan untuk berdagang.¹³

Setelah diketahui beberapa pengertian yang dijelaskan di atas, kiranya dapat dipahami bahwa *mudharabah* atau *qiradh* ialah akad antara pemilik modal (harta) dengan pengelola modal tersebut, dengan syarat bahwa keuntungan diperoleh dua pihak sesuai jumlah kesepakatan.¹⁴ Secara teknis, *mudharabah* adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak, dimana pihak pertama bertindak sebagai pemilik dana (*shahibul mal*) yang menyediakan seluruh modal (100%), sedangkan pihak lainnya sebagai pengelola usaha (*mudharib*). Keuntungan usaha yang didapatkan dari akad *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, dan biasanya berbentuk nisbah (presentase).¹⁵

Sebagai suatu bentuk kontak, *mudharabah* merupakan akad bagi hasil ketika pemilik modal/dana (pemodal), bisa disebut *shahibul mal/rabbul mal*,

¹¹ Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Mudharabah

¹² Muhammad Musleihudin, *Sistem Perbankan Dalam Islam*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1994), h.63.

¹³ Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Prenadamedia Grup, 2019), h.107.

¹⁴ *Ibid.*, Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah....*, h.136

¹⁵ Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah....*, h.224

menyediakan modal (100 persen) kepada pengusaha sebagai pengelola, bisa disebut *mudharib*, untuk melakukan aktivitas produktif dengan syarat bahwa keuntungan yang dihasilkan akan dibagi di antara mereka menurut kesepakatan yang ditentukan sebelumnya dalam akad (yang besarnya juga dipengaruhi oleh kekuatan pasar). *Shahibul mal* (pemodal) adalah pihak yang memiliki modal, tidak bisa berbisnis, dan *mudharib* (pengelola atau *entrepreneur*) adalah pihak yang pandai berbisnis, tetapi tidak memiliki modal.¹⁶

2. Dasar Hukum *Mudharabah*

Islam mensyari'atkan dan membolehkan kepada umatnya untuk memberikan kemudahan kepada manusia lainnya. Sebagian orang terkadang memiliki harta, akan tetapi dia tidak memiliki kemampuan untuk menjadikan harta tersebut berkembang, dan sebaliknya ada orang yang tidak memiliki harta tetapi ia mampu mengembangkan harta. Hal tersebut menjadi salah satu alasan Islam mensyari'atkan untuk bermuamalah, agar kedua belah pihak tersebut dapat mengambil manfaat.

Banyak ayat al-Quran dan hadist Nabi saw yang memerintahkan manusia agar bekerja. Manusia dapat bekerja apa saja menurut kemampuan yang dimilikinya yang penting tidak melanggar garis-garis yang telah ditentukannya. Manusia bisa melakukan aktifitas produksi, pertanian, perkebunan, peternakan serta pengolahan makan dan minum. Manusia juga

¹⁶ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007), h.60.

dapat melakukan aktifitas distribusi, seperti perdagangan atau dalam bidang jasa, seperti transportasi, kesehatan dan sebagainya.

Akad *mudharabah* dibolehkan dalam Islam, karena bertujuan untuk saling membantu antara pemilik modal dengan pakar atau ahli dalam memutar modal dan sama-sama mencari keuntungan. Banyak diantaranya pemilik modal yang tidak mampu dalam mengelola dan memproduktifkan uangnya, sementara banyak pula yang memiliki kemampuan dibidang perdagangan namun tidak memiliki modal untuk berdagang. Atas dasar saling menolong dalam pengelolaan modal itu, Islam memberikan kesempatan untuk saling bekerjasama antara pemilik modal dengan seseorang yang terampil dalam mengelola dan memproduktifkan modal tersebut. Adapun dasar hukum yang disyari'atkan dalam Islam adalah sebagai berikut :

a. Al-Qur'an

a) Al-Qur'an Surat Al-Muzammil ayat 20 disebutkan:

وَأٰخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ

Artinya: “Dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah.”¹⁷

b) Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 198 disebutkan:

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ

Artinya: “Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezki hasil perniagaan) dari Tuhanmu.”¹⁸

¹⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahan*, (Bandung: CV Penerbit J-ART, 2014), h.82.

Ayat di atas menjelaskan bahwa tidak ada dosa bagi kalian untuk mencari rizki dari Tuhan kalian untuk mengambil keuntungan dari perniagaan pada hari-hari haji.¹⁹ Kalimat ini memberikan perasaan kepada orang yang melakukannya bahwa ia sedang mencari karunia Allah ketika ia berdagang, bekerja, dan ketika mencari sebab-sebab rezeki kepada dirinya dengan pekerjaan. Tetapi ia hanya mencari karunia dari Allah, lalu Allah memberikannya. Oleh karena itu, patutlah baginya untuk tidak melakukan hakikat ini, yaitu bahwa ia mencari karunia Allah. Ia akan mendapatkan karunia ini ketika berusaha dan bekerja, dan memperoleh rezekinya melalui sebab-sebab yang dilakukan untuk mendapatkan rezeki.²⁰

c) Al-Qur'an Surat Al-Jumu'ah ayat 10 disebutkan:

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ
كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: “apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung²¹.”

Maksud dari ayat di atas adalah apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kalian di muka bumi, perintah ini menunjukan

¹⁸ *Ibid.*, h.31.

¹⁹ Syaihk Al-alamah, Shalih Bin Muhammad Alu asy-Syakh, *Tafsir Muyassah*, (Jakarta:Darul Haq, 2016), h.93.

²⁰ *Ibid.*, Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahan....*, h. 554

²¹ *Ibid.*, h.3

pengertian ibadah atau oleh (dan carilah) rezeki (karunia Allah, dan ingatlah Allah) dengan ingatan sebanyak-banyaknya supaya kalian beruntung, yakni memperoleh keberuntungan. Pada hari jumat, Nabi Saw. berkhotbah akan tetapi tiba-tiba datanglah rombongan kafilah membawa barang-barang dagangan, lalu dipukulan gendrang menyambut kedatangan sebagaimana biasanya. Maka orang-orang pun berhamburan keluar dari masjid untuk menemui rombongan itu kecuali hanya dua belas orang saja masih tetap bersama nabi saw. lalu turunlah ayat ini.²²

Hubungan ketiga ayat di atas adalah sama-sama mendorong kaum muslimin untuk melakukan upaya perjalanan usaha atau bisnis lainnya seperti usaha yang ada pada sistem bagi hasil *mudharabah* dan *syirkah* salah satunya. Selain itu, Al-Quran tidak secara langsung menuju istilah *mudharabah* melainkan melalui hasil kata Arab yang diungkapkan sebanyak lima puluh delapan kali. Dari beberapa kata inilah kemudian mengalami konsep *mudharabah*, meskipun tidak disangkal bahwa *mudharabah* suatu perjalanan jauh yang bertujuan bisnis dan mencari keuntungan.²³ Nabi dan para sahabat juga pernah menjalankan usaha kerja sama berdasarkan prinsip ini.

²² Al-Imam Jalaludin Muhammad, et. Al., *Tafsir Jalalain*, (Surabaya: PT. Elbah Mandiri Sejahtera), h,781.

²³ Asad Muhammad, *The Message of the Quran*, (Gibraltar: Dar Al Andalus, 1985), h.92

b. Hadis

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكَةُ: الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ،
وَالْمُقَارَضَةُ، وَخَلْطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ عَنْ صَهِيبٍ لَا لِلْبَيْعِ (رواه ابن ماجه)²⁴

Artinya: “Nabi bersabda, ‘Ada tiga hal yang mengandung berkah: jual beli tidak secara tunai, muqaradhadh (mudharabah), dan mencampurkan gandum dengan jewawut untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual.’ (HR. Ibnu Majah dari Shuhaib)”.

Maksud dari hadis di atas adalah bahwa *mudharabah* bukan hanya dibolehkan bahkan diberkahi. Karena pada dasarnya akad ini bersifat amanah (*yad al-amanah*) maka dalam *mudharabah* tidak ada ganti rugi. Masing-masing pihak berkontribusi sesuai fungsinya, *shahibul mal* dengan hartanya dan *mudharib* dengan tenaga dan waktunya. Apabila terjadi keuntungan keduanya berhak atas nisbah keuntungan sesuai kesepakatan.

كَانَ سَيِّدُنَا عَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ إِذَا دَفَعَ الْمَالَ مُضَارَبَةً اشْتَرَطَ عَلَى
صَاحِبِهِ أَنْ لَا يَسْلُكَ بِهِ بَحْرًا، وَلَا يَنْزِلَ بِهِ وَادِيًا، وَلَا يَشْتَرِيَ بِهِ دَابَّةً ذَاتَ كَبِدٍ
رَطْبَةٍ، فَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ ضَمِنَ، فَبَلَغَ شَرْطُهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ
فَأَجَازَهُ (رواه الطبراني في الأوسط عن ابن عباس)²⁵

Artinya: “Abbas bin Abdul Muthalib jika menyerahkan harta sebagai mudharabah, ia mensyaratkan kepada mudharib-nya agar tidak mengarungi lautan dan tidak menuruni lembah, serta tidak membeli hewan ternak. Jika persyaratan itu dilanggar, ia (*mudharib*) harus menanggung resikonya. Ketika persyaratan

²⁴ Ibid., Dewan Syariah Nasional MUI, *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah*..., h.79

²⁵ Ibid., h.78

yang ditetapkan Abbas itu didengar Rasulullah, beliau membenarkannya.” (HR. Thabrani dari Ibnu abbas).

Maksud dari hadits di atas adalah mengacu pada *Mudharabah Muqayyadah* (terikat), penyerahan modal seseorang kepada pengusaha dengan memberikan batasan, seperti persyaratan bahwa pengusaha harus berdagang di daerah Bandung atau harus berdagang sepatu, atau membeli barang dari orang tertentu, dan lain-lain. Dan apabila *mudharib* bertindak bertentangan dengan pengawasan tersebut, maka *mudharib* harus bertanggung jawab sendiri atas konsekuensi yang ditimbulkan.

عَنْ صُهَيْبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرْكََةُ: الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ وَالْقَارِضَةُ وَخَلْطُ الْبُرِّ بِرَبِّ الثَّعِيرِ لَلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ (رَوَاهُ ابْنُ مَاجٍ بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ)²⁶

Artinya: “Shuaib ra. Telah menceritakan, bahwa Nabi saw pernah bersabda, “ada tiga macam perkara yang bertempo, meminjamkan modal, dan mencampurkan jewawut dengan gandum untuk dikonsumsi sendiri, bukan untuk diperjualbelikan.” Hadits ini mungkar menurut Syaikh Nashiruddin al-Albani”.

Maksud dari hadis di atas adalah jual beli yang diberikan tempo maksudnya seperti kredit tapi tanpa bunga itu sangat membantu orang yang pada saat itu sangat memerlukan uang. Dan jangan pernah kalian meminta kelebihan karena kelebihan itulah yang dinamakan riba dan riba itu diharamkan. Peminjaman yang dimaksud adalah peminjaman *mudharabah* sebagaimana disabdakan oleh Rasul pada hadits tersebut.

²⁶ Ibnu Hajar Al-Asqolani, *Bulughul Marom Adilatil Ahkam*, (Surabaya: Daarun Nasyr Al-mishriyah), h.186.

dengan menunjukan adanya keberkahan ini, hal ini mengidentifikasikan diperbolehkannya praktek jual beli yang dilakukan secara tempo, begitu juga dengan pembiayaan *murabahah* yang dilakukan secara tempo, dalam artian nasabah diberi tenggang waktu untuk melakukan pelunasan atas harga sesuai kesepakatan. Sedangkan mencampurkan gandum dengan jewawut untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual, yang dimaksud disini seperti gandum, biji-bijian bukan untuk dijualbelikan ketika panen tetapi hanya untuk kebutuhan keluarga saja.

c. Ijma

Ibn Taymiyah menetapkan landasan hukum *mudharabah* dengan ijma yang berlandaskan pada nash. *Mudharabah* sudah terkenal dikalangan bangsa Arab jahiliyah, terlebih dikalangan suku Quraish. Mayoritas orang Arab bergelut dibidang perdagangan. Para pemilik modal memberikan modal mereka kepada para pengelola. Rasulullah Saw. pun pernah mengadakan perjalanan dagang dengan membawa modal orang lain sebelum beliau diangkat menjadi nabi. Beliau juga pernah mengadakan perjalanan dagang dengan mengelola modal Khadijah.²⁷

Kesepakatan ulama akan bolehnya *mudharabah* dikutip dari Dr.Wahbah Zulaihi ulama dari kitab *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*. Diriwayatkan bahwa sejumlah sahabat melakukan *mudharabah* dengan menggunakan harta anak yatim sebagai modal dan tak seorangpun dari mereka yang menyanggah atau menolak. Beliau itu antara lain Umar ibn

²⁷ Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*...., h.226

al-Khattab, Utsman ibn Affan, Ali ibn Abi Thalib, Abdullah ibn Mas'ud, Abdullah ibn Umar, Abdullah ibn Amir dan Aisyah.²⁸ Jika praktik sahabat suatu amalan tertentu yang disaksikan oleh sahabat yang lain lalu tidak seorang pun menyanggah, maka hal itu merupakan ijma. Ketentuan ijma ini secara sharih mengakui keabsahan praktik pembiayan *mudharabah* dalam sebuah perniagaan.

Para sahabat telah menyerahkan harta para anak yatim untuk dijadikan *mudharabah*. Mereka adalah Umar bin al-khatib, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Umar, Ubaidillah bin Amr, dan Aisyah. Menurut riwayat tidak ada seorang pun yang menolak apa yang mereka lakukan tersebut, dan ini telah menjadi Ijma. Oleh karena itu, *mudharabah* ini telah dipraktikkan sejak zaman Nabi sampai sekarang, tanpa ada seorang pun yang menolaknya. Dan Ijma (kesepakatan) setiap masa adalah hujjah²⁹. *Mudharabah* disyariatkan berdasarkan Ijma (kesepakatan) para sahabat dan berdasarkan kesepakatan para imam yang menyatakan kebolehan. Hal ini didasarkan dalil yang mengungkapkan bahwa tolong menolong dalam kebaikan dan saling menegah dalam hal kemungkaran.

d. Qiyas

Mudharabah qiyaskan kepada *al-musyaqah* (menyuruh seseorang untuk mengelola kebun). Selain diantara manusia, ada yang kaya dan ada

²⁸ Khosyi'ah, *Fiqh Muamalah Perbandingan*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2014), h.154

²⁹ Enang Hidayat, *Transaksi Ekonomi Syariah*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2016), h.162

pula yang fakir, dan di antara masyarakat ada yang mempunyai modal, namun ia tidak memiliki keahlian dalam berbisnis atau mengelola modalnya tersebut, dan sebaliknya ada masyarakat yang tidak mempunyai modal, namun ia mempunyai keahlian dalam berbisnis, maka keduanya saling membutuhkan. Oleh karena itu, disyariatkannya *mudharabah* ini untuk kemaslahatan manusia, dalam hal ini untuk memenuhi kebutuhan di antara manusia.³⁰

e. Fikih Kaidah

الأَصْلُ فِي الْعَامِلَةِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

Artinya: “Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.”³¹

Hukum asal dari akad transaksi muamalah, apapun bentuk dan modelnya, adalah mubah (boleh), dengan catatan selama tidak ada dalil yang secara tegas mengharamkannya, atau akad tersebut tidak menyelisihi konsep aturan dari dalil-dalil umum yang telah ada.

3. Rukun dan Syarat *Mudharabah*

Para ulama berbeda pendapat tentang rukun *mudharabah*. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa rukun *mudharabah* adalah ijab dan qabul, yakni lafazh yang menunjukkan ijab dan qabul dengan menggunakan

³⁰ Zainudin Ali, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafindo, 2006), h.155.

³¹ Ridho Rokamah, *al-Qawa'id al-Fiqiyyah*, (Ponorogo: STAIN Po Press, 2014), h.53.

mudharabah, *muqaridhah*, *muamalah*, atau kata-kata yang searti dengannya.³²

Menurut ulama Syafiiyah³³ rukun *mudharabah* ada enam, yaitu:

- a. Pemilik barang yang menyerahkan barang-barangnya (*shahibul mal*)
- b. Orang yang bekerja, yaitu mengelola barang yang diterima dari pemilik barang
- c. *Aqad mudharabah*, dilakukan oleh pemilik dengan pengelola barang
- d. Mal yaitu harta pokok atau modal
- e. Amal yaitu pekerjaan pengelolaan harta sehingga menghasilkan laba
- f. Keuntungan

Menurut ulama Malikiyah ada beberapa rukun *mudharabah*, yaitu :

- a. Modal adalah sejumlah uang atau aset yang diberikan oleh penyedia dana kepada *mudharib* untuk tujuan usaha.
- b. Amal
- c. Laba adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal
- d. Pihak yang mengadakan perjanjian
- e. Sighat (ijab dan qabul)

Menurut Abdullah Al-Muslih³⁴, seperti bentuk usaha lain, bisnis bagi hasil ini juga memiliki tiga rukun, yaitu :

³² *Ibid.*, Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*..., h.226.

³³ *Ibid.*, Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*..., h.139.

³⁴ Abdullah Al-Muslih, *Fikih Keuangan Ekonomi Islam*, (Jakarta: Darul Haq, 2008), h.170-178.

a. Dua pihak yang melakukan akad

Kedua pihak adalah investor dan pengelola modal. keduanya disyaratkan memiliki kompetensi beraktivitas. Yakni orang yang tidak dalam kondisi bangkrut terlilit hutang, anak kecil, orang gila, semuanya tidak boleh melakukan transaksi ini.

b. Objek akad

Objek akad dalam rangka kerjasama bagi hasil ini tidak lain adalah modal, jenis usaha dan keuntungan.

c. Modal

Modal disyaratkan harus alat tukar seperti emas atau uang secara umum. Penanaman modal ini tidak boleh dilakukan dengan menggunakan barang kecuali bila disepakati untuk menetapkan nilai harga dengan uang. Sehingga nilainya itulah yang menjadi modal yang digunakan untuk memulai usaha. Atas itulah hitung-hitungan dianggap selesai untuk masa kemudian.

d. Jenis usaha

Asal dari usaha dalam bisnis bagi hasil (penanaman modal) adalah dibidang perniagaan atau bidang-bidang terkait lainnya. Pengelola tidak boleh bekerja sama dalam penjualan barang-barang haram berdasarkan kesepakatan ulama seperti jual beli bangkai, darah, daging babi, minuman keras, dan jual beli riba atau yang sejenisnya.

e. Keuntungan

Keuntungan dalam sistem penanaman modal dan ditegaskan presentase tertentu bagi pemilik modal dan pengelola modal yang sifatnya merata seperti, setengah, sepertiga atau seperempat sejenisnya. Kalau ditetapkan sejumlah keuntungan bagi salah satu pihak, sementara sisanya untuk pihak yang lain, maka itu adalah usaha investasi yang tidak sah. Karena bisa jadi keuntungan dari usaha itu hanyalah sebagian, sehingga kerjasama harus diberhentikan. Lebih rusak lagi dari modalnya yang tidak terkait dengan usaha penanaman modal karena itu berarti mengkompromikan antara usaha melalui sistem penanaman modal ini dengan usaha berbasis riba.³⁵

Menurut jumhur ulama bahwa rukun *mudharabah* ada 3, yaitu: *'aqidyni* (kedua orang yang melakukan perjanjian), *ma'qud 'alayh* (saham/modal), dan *sighat* (pernyataan ijab dan qabul dari kedua belah pihak).³⁶

Rukun *mudharabah* adalah pemodal, pengelola, modal, nisbah, keuntungan, dan *shighat* atau akad.

1. Pemodal dan Pengelola

- a. Pemodal dan pengelola harus mampu melakukan transaksi dan sah secara hukum

³⁵ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Nadirsyah Hawari, 2010), h.259.

³⁶ Abu Hazam Al-Hadi, *Fikih Muamalah Kontemporer*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2017), h.3.

- b. Keduanya harus mampu bertindak sebagai wakil dan wafil dari masing-masing pihak
- c. Sah sesuai dengan syarat-syarat yang diajukan dalam penawaran, dan akad bisa dilakukan secara lisan atau verbal, secara tertulis maupun ditandatangani.³⁷

2. Modal

Modal adalah sejumlah uang yang diberikan oleh penyedia dana kepada pengelola untuk tujuan menginvestasikannya dalam aktivitas *mudharabah*. Untuk itu, modal disyaratkan harus³⁸ :

- a. Dinyatakan dengan jelas jumlah dan jenisnya (yaitu mata uang). Apabila modal berbentuk barang, maka barang tersebut harus dihargakan dengan harga semasa dalam uang yang beredar (atau sejenisnya)
- b. Harus berbentuk tunai bukan piutang (namun sebagian ulama membolehkan modal *mudharabah* berbentuk aset perdagangan misalnya *inventory*)
- c. Harus diserahkan kepada *mudarib* untuk memungkinkannya melakukan usaha.

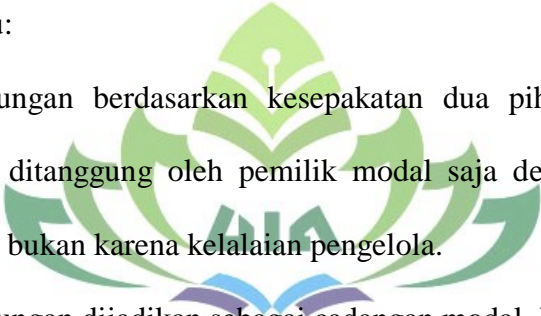
3. Keuntungan

Keuntungan dalam sistem penanaman modal (bagi hasil) ini hendaknya diketahui secara jelas dan ditegaskan presentase tertentu bagi pemilik modal dan pengelola modal yang sifatnya merata seperti

³⁷ *Ibid*, Fathurrahman Djamil, *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah*, h.175.

³⁸ *Ibid*, h.175.

setengah, sepertiga atau seperempat dan sejenisnya. Kalau ditetapkan sejumlah keuntungan bagi salah satu pihak, sementara sisanya untuk pihak yang lain, maka itulah usaha investasi yang tidak sah. Karena bisa jadi keuntungan dari usaha itu hanyalah bagian, sehingga kerja sama itu harus diberhentikan dalam keuntungannya. Lebih rusak lagi dari ini adalah apabila pemilik memberikan syarat presentase tertentu dari modalnya yang tidak terikat dengan usaha penanaman modal karena itu berarti memusyawarahkan antara usaha berbasis riba. Ada sejumlah kode etik dalam sistem pembagian keuntungan dalam usaha kerja sama bagi hasil yaitu:

- 
- a. Keuntungan berdasarkan kesepakatan dua pihak, namun kerugian hanya ditanggung oleh pemilik modal saja dengan syarat kerugian terjadi bukan karena kelalaian pengelola.
 - b. Keuntungan dijadikan sebagai cadangan modal. Kalau ada keuntungan disatu sisi dan kerugian atau kerusakan disisi lain, maka kerugian atau kerusakan itu harus ditutupi terlebih dahulu oleh keuntungan yang ada, kemudian yang tersisa dibagi-bagikan berdua sesuai dengan kesepakatan.
 - c. Pengelola tidak boleh mengambil keuntungan sebelum masa pembagian. Alasan tidak dibolehkannya pengelola modal mengambil bagiannya dari keuntungan kecuali setelah masa pembagian karena bisa saja terjadi kerugian setelah itu, sehingga bukan hanya dengan

pembagian saja, tetapi agar hak masing-masing dari kedua belah pihak terjaga.

Keuntungan adalah yang didapat sebagai kelebihan dari modal. Keuntungan adalah tujuan akhir *mudharabah*. Keuntungan dipersyaratkan sebagai berikut :

- a. Harus dibagi untuk kedua belah pihak.
- b. Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam presentase dari keuntungan yang mungkin dihasilkan nantinya
- c. Rasio presentase (nisbah) harus dicapai melalui negosiasi dan dituangkan dalam kontrak
- d. Waktu pembagian keuntungann dilakukan setelah *mudarib* mengembalikan seluruh (atau sebagian) modal kepada *shahibul mal*.

Sementara itu, syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam transaksi *mudharabah* adalah sebagai berikut :

- a. Modal harus tunai
- b. Modal harus jelas sehingga dapat dibedakan antara modal dan keuntungan yang akan dibagi untuk kedua belah pihak sesuai kesepakatan
- c. Pembagian keuntungan *mudharabah* harus jelas persentasenya, untuk pihak pekerja dan pemilik modal, seperti setengah, sepertiga, atau seperempat.

d. *Mudharabah* harus bersifat mutlak. Pihak pemilik modal tidak boleh membatasi pihak pekerja untuk berdagang di negeri tertentu, barang tertentu, waktu tertentu, orang tertentu atau ketentuan lain.³⁹

4. Macam-Macam *Mudharabah*

Dalam kaitannya dengan pekerjaan, atau usaha yang dilakukan oleh pengusaha, *mudharabah* dapat dibedakan menjadi akad *mudharabah muthlaqah* dan *mudharabah muqayyadah*. Berikut adalah macam-macam dari *mudharabah* :

1. Mudharabah Muthlaqah

Mudharabah al-muthlaqah adalah penyerahan modal secara mutlak tanpa syarat dan pembatasan. *Sahib al-mal* memberikan kekuasaan penuh untuk mengelola modal usaha, tidak membatasi tempat usaha, tujuan maupun jenis usaha kepada *mudharib*. Misalnya *shahibul mal* berkata, “saya serahkan uang ini kepadamu untuk diusahakan, sedangkan labanya akan dibagi diantara kita, masing-masing setengah atau sepertiga, dan lain-lain.”⁴⁰

Dalam akad *mudharabah Muthlaqah*, pemberi modal menyerahkan modalnya kepada pengusaha untuk dipakai dalam usaha apapun, tidak dibatasi jenis dan tempatnya, sehingga dalam akad ini pekerjaan atau bidang usaha yang dilakukan oleh pengusaha bersifat mutlak.⁴¹

³⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2004), h.218-219.

⁴⁰ Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 227

⁴¹ Hasni Ahmad Said & Faturrahman Rauf, *Radikalisme Agama Dalam Perspektif Hukum Islam, Al- 'Adalah Jurnal Hukum Islam*, (Fakultas Syari'ah UIN RIL., Vol.XII, No.3, Juni 2015), h.495.

Menurut Dewan Redaksi Ensiklopedia Hukum Islam, dalam *mudharabah muthlaqah*, *mudharib* bebas mengelola modal yang diberikan *shahibul mal* untuk tujuan usaha apa saja yang menurut pertimbangannya akan mendatangkan keuntungan.⁴² Tidak ditentukan masa berlakunya, di daerah mana saja usaha tersebut dilakukan. Kebebasan *mudharib* dalam hal *mudharabah muthlaqah* bukan kebebasan yang tidak terbatas sama sekali. Modal yang ditanamkan oleh *shahibul mal* tidak boleh digunakan untuk membiayai proyek atau investasi yang dilarang oleh Islam, seperti memproduksi atau perdagangan minuman keras (sekali pun diperbolehkan atau diizinkan resmi dari pemerintah), peternakan babi, dan lain sebagainya.

Dalam *mudharabah muthlaqah*, *mudharib* juga memiliki mandat yang terbuka dan berwenang untuk melakukan apa saja yang diperlukan untuk keberhasilan tujuan *mudharabah* itu dalam rangka pelaksanaan bisnis yang bersangkutan. Namun ternyata *mudharib* melakukan kelalaian atau kecurangan, maka *mudharib* harus bertanggung jawab atas konsekuensi yang ditimbulkannya.⁴³

Ketentuan yang harus ada dalam *mudharabah muthlaqah* yaitu:

- a. . pendapatan atau keuangan tersebut dibagi berdasarkan nisbah yang telah disepakati di awal akad
- b. Pemilik akad tidak boleh ikut serta dalam pengelolaan usaha, tetapi dibolehkan membuat usulan atau melakukan pengawasan. *Mudharib*

⁴² Dewan Redaksi Ensiklopedia Hukum Islam, *Ensiklopedia Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1994), h.1197.

⁴³ Imam Mustafa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Jakarta: Rajawali Press, 2010), h.149.

mempunyai kekuasaan penuh untuk mengelola modal dan tidak ada batasan, baik mengenai tempat, tujuan maupun jenis usahanya

- c. Penetapan *mudharabah muthlaqah* dapat berupa tabungan dan deposito, sehingga terdapat dua jenis himpunan dana, yaitu tabungan *mudharabah* dan deposito *mudharabah*
- d. Pemilik modal (tabungan *mudharabah*) dapat mengambil dananya, apabila sewaktu-waktu dibutuhkan sesuai dengan perjanjian yang disepakati, namun tidak diperkenankan mengalami saldo negatif.
- e. Deposito *mudharabah* hanya dapat dicairkan sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati, 1, 3, 6 atau 12 bulan.

2. Mudharabah Muqayyadah (terikat)

Mudharabah Muqayyadah (terikat) adalah penyerahan modal seseorang kepada pengusaha dengan memberikan batasan, seperti persyaratan bahwa pengusaha harus berdagang di daerah Bandung atau harus berdagang sepatu, atau membeli barang dari orang tertentu, dan lain-lain.⁴⁴

Apabila *mudharib* bertindak bertentangan dengan pengawasan tersebut, maka *mudharib* harus bertanggung jawab sendiri atas konsekuensi yang ditimbulkan. Pada *mudharabah* ini harus dibatasi waktunya, maka *mudharabah* berakhir pada jangka waktu tiba.

Sehingga dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan *mudharabah muqayyadah* ini merupakan simpanan khusus (*restricted*),

⁴⁴ *Ibid*, Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, h.227.

pemilik dana (*shahibul mal*) dapat menetapkan syarat-syarat khusus yang harus dipatuhi oleh pihak lain sebagai pengelola (*mudharib*), baik mengenai tempat, tujuan, maupun jenis usahanya.⁴⁵

Jika *mudharabah* dilaksanakan dengan batasan tempat, maka *mudharib* tidak boleh bekerja selain di tempat yang sudah disyaratkan oleh *shahibul mal*. Hal itu karena ucapan pemilik modal (dengan syarat) merupakan lafal-lafal, dan itu adalah syarat yang memiliki faedah dan tujuan karena setiap tempat memiliki perbedaan dalam hal murah dan mahalnyanya barang yang dimiliki suatu resiko perjalanannya.⁴⁶ Jika pemilik modal berkata, “ dengan syarat kamu membeli dari si fulan dan menjual kepadanya,” maka syarat (batasan) tersebut adalah sah menurut ulama Hanafiyah dan Hambali karena syarat itu dapat memberi faedah untuk menambah kepercayaan kepadanya dalam muamalah.⁴⁷

Apabila pemilik modal menentukan waktu *mudharabah* dengan waktu tertentu dimana jika waktu itu berlalu maka batallah akadnya. Dalam hal ini akad tersebut sah menurut ulama Hanafiyah dan Hambali karena itu adalah pemberian kuasa (*wakalah*) maka waktu *mudharabah* menjadi tertentu dengan adanya batasan tersebut.⁴⁸

Pada *mudharabah muqayyad*, terdapat hak-hak *mudharib* yang harus dipenuhi oleh *shahibul mal*. Sejumlah ulama seperti Ibrahim an-Nakha'i dan Hasan al-Basri berpendapat bahwa *mudharib* berhak

⁴⁵ Sahrawardi K.Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), h.52.

⁴⁶ Az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu Jilid 5, terjemahan Abdul Hayyie al-Kattani*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), h.501.

⁴⁷ *Ibid*, h.502.

⁴⁸ *Ibid*, h.503.

mendapat biaya baik ketika menetap maupun sedang berpergian. Sedangkan mayoritas fuqaha diantaranya Abu Hanifah, Malik, dan Shi'ah Zaidiyah berpendapat bahwa *mudharib* berhak mendapat biaya ketika sedang berpergian dan tidak berhak saat sedang menetap. Biaya ini diambil dari keuntungan jika ada dan jika tidak ada maka diambil dari *mudharabah*. Biaya tersebut mencakup seperti apa yang dibutuhkan oleh *mudharib* seperti makanan dan pakaian.⁴⁹

5. Prinsip Mudharabah

Prinsip-prinsip *mudharabah* tidak terlepas dari prinsip-prinsip muamalah Islam. Oleh karenanya *mudharabah* harus tetap mengacu pada aturan syari'at Islam dan aturan Fiqih muamalah menjadi indikatornya. Artinya sesuai atau tidak mekanisme dalam *mudharabah* sangat ditentukan kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip muamalah Islam.

Adapun prinsip-prinsip *mudharabah* dalam muamalah Islam adalah sebagai berikut:

a. Prinsip kebolehan melakukan akad *mudharabah*

Artinya, bahwa akad *mudharabah* itu dibenarkan oleh Al-Qur'an dan sunah Rasul. Dalam *mudharabah* harus tetap berpegang teguh pada ketentuan syari'at Islam sebagaimana telah dijelaskan pada landasan hukum *mudharabah* (Al-Qur'an dan Sunnah). *Mudharabah* dibenarkan karena memiliki manfaat bagi orang banyak, terutama bagi kaum lemah dan pengusaha tidak dikenakan tanggungan terhadap

⁴⁹ *Ibid*

modal yang rusak selama ia melampaui batas dalam arti kerugian itu disebabkan konsekuensi dari bisnis.⁵⁰

- b. Prinsip sukarela tanpa paksaan, akad *mudharabah* mencerminkan kerelaan untuk bekerjasama, maka tidak boleh ada salah satu pihak yang melakukan akad ini dalam keadaan terpaksa. Selain itu, akad *mudharabah* bertujuan untuk membantu kehidupan kaum lemah, bukan semata-mata mencari keuntungan, bukan juga salah satu cara untuk mengekplotir. Untuk itulah dalam bentuk kerja sama ini dituntut adanya kebebasan dari pengusaha untuk berusaha sesuai dengan keinginan pemilik modal.⁵¹

- c. Prinsip mendatangkan manfaat dan mendatangkan kemudharatan

Sebagai makhluk sosial, kebutuhan dan kerjasama antara satu pihak dengan pihak yang lain guna meningkatkan taraf hidup khususnya dalam bidang ekonomi merupakan hal yang tidak bisa diabaikan, tetapi tidak bisa mengelola modal tersebut, dan keinginan membantu orang lain dengan jalan memberikan modal yang ia miliki kepada pihak lain yang membutuhkan dan mampu mengelola modal tersebut. berdasarkan kenyataan ini, maka diperlukan kerja sama antara yang memiliki modal dari orang lain yang tidak mempunyai atau kekurangan modal.

Pada bentuk kerja sama *mudharabah*, pemilik modal dan pengelola sangat diuntungkan, disatu sisi pemilik modal mendapatkan

⁵⁰ Ahmad Azhar, *Azas-azas Hukum Muamalah (Hukum Perdata Islam)*, (Yogyakarta: Pustaka Fakultas Hukum UII, 1990), h.10.

⁵¹ Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2002), h.14

keuntungan dari investasi yang diberikan. Sementara itu, disisi lain bagi orang yang memerlukan modal ia akan sangat membantu dengan adanya kerjasama tersebut. pengusaha berusaha dalam lapangan ekonomi serta terhindar dari pengangguran, dan dapat meningkatkan taraf kehidupan mereka. Dengan demikian, terciptalah kemaslahatan dan terhindar dari kemudharatan seperti kemiskinan dan pengangguran.

d. Prinsip keadilan

Sifat semangat, kebersamaan dan keadilan tampak jelas dalam kerjasama *mudharabah*. Hal ini dapat dilihat melalui kebersamaan dalam menanggung kerugian yang dialami dalam usaha, kerugian akan ditanggung pemilik modal apabila kerugian itu merupakan akibat dari bisnis, bukan karena rekayasa. Pihak pengelola menanggung kerugian skill, dan waktu, sedangkan apabila mendapatkan keuntungan akan dibagi bersama sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.⁵²

6. Hak dan Kewajiban *Shahibul mall* dan *Mudharib*

a. Hak dan Kewajiban Pemilik modal⁵³ :

1. Pemilik modal berhak menyediakan dan menyerahkan modal 100%
2. Pemilik modal memiliki hak penuh atas modal yang diberikan kepada pengelola

⁵² Abdurrahman Jaziri, *Al-Fiqh Ala Madzahib Al-arba'ah Juz II*, (Mesir: Tiariyah Qubra, 2000), h.48

⁵³ Surat Perjanjian Kerja Sama Gaduhan, (Online), Tersedia di <http://kttsaraswati.blogspot.co.id/2013/04.surat-perjanjian-kerjasama-gaduhan.html/m=1>, diakses 18 Februari 2021.

3. Pemilik modal berhak melakukan pengawasan terhadap jalannya kegiatan usaha. Meskipun pekerja tetap mempunyai hak eksklusif untuk mengelola tanpa campur tangan pemilik modal.
4. Pemilik modal mempunya hak untuk memberikan bimbingan, petunjuk serta saran selama kerugian tersebut terjadi bukan karena kelalaian pekerja
5. Pemilik modal berkewajiban menanggng biaya operasional seluruh kegiatan usaha yang dijadikan suatu kerjasama
6. Jika kegiatan usaha yang dilakukan pengelola mengalami kerugian maka pemilik modal bertanggungjawab atas kerugian tersebut.

b. Hak dan Kewajiban Pengelola

Pengelola (*mudharib*) memiliki beberapa hal dalam akad *mudharabah*, yakni nafkah (biaya hidup) dan keuntungan yang disepakati dalam akad. Ulama berbeda pendapat tentang hak *mudharib* atas aset *mudharabah* untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, baik ketika di rumah maupun dalam perjalanan.

Menurut Imam Syafe'i, *mudharib* tidak berhak mendapatkan nafkah atas kebutuhan pribadinya dari aset *mudharabah*, baik di rumah maupun dalam perjalanan. Karena *mudharib*, kelak akan mendapatkan keuntungan. Nafkah ini bisa jadi sama nominalnya dengan bagian

keuntungan, dan *mudharib* akan mendapatkan lebih. Jika nafkah ini disyaratkan dalam kontrak maka akad *mudharabah* hukumnya fasid.

Menurut Abu Hanifah dan Imam Malik, *mudhraib* hanya berhak mendapatkan nafkah dari aset *mudharabah* ketika ia melakukan perjalanan, baik biaya transportasi, makan, maupun pakaian. Madzhab Hanabilah memberikan keleluasaan, *mudharib* berhak mendapatkan nafkah pribadi, baik di rumah maupun dalam perjalanan, dan boleh menjadikan syarat dan akad.

Menurut Hanafi'yah, *mudharib* berhak mendapatkan nafkah dari aset *mudharabah* untuk memenuhi kegiatan bisnis yang meliputi : makan, minum, pakaian, begitu juga dengan biaya dokter. Semuanya ini diperlukan demi kelancaran bisnis yang dijalankan. Kadar nafkah ini harus disesuaikan dengan yang berlaku dikhalayak umum.

Biaya yang dikeluarkan oleh *mudharib* (dalam menjalankan bisnis) akan dikurangi dari keuntungan, namun jika tidak ada keuntungan, akan dikurangi dari aset *shahibul mall* dan dihitung dari kerugian. Jika *mudharib* melakukan perjalanan bisnis diambil dari aset *mudharabah*. Ketika ia kembali, jika terdapat biaya sisa perjalanan, harus dikembalikan dan dihitung kembali sebagai aset *mudharabah*. Jika *mudhrabah* menggunakan biaya pribadi maka akan menjadi untung dan akan dikurangkan dari aset *mudharabah*.

Selain itu, *mudharib* juga berhak mendapatkan keuntungan namun jika bisnis yang dijalankan tidak mendapatkan keuntungan, *mudharib*

tidak berhak mendapatkan apapun. Keuntungan akan dibagikan setelah *mudhraib* menyerahkan aset yang diserahkan *shahibul mall* secara utuh, jika masih terdapat kelebihan sebagai keuntungan maka dibagi sesuai dengan kesepakatan.

Menurut Hanafi'yah, Malikiyah, dan Syafi'iyah, *mudharib* berhak mendapatkan bagian atas hasil bisnis, tanpa harus dihitung dari keuntungan. Akan tetapi mayoritas ulama sepakat, *mudharib* harus mengembalikan pokok harta *shahibul mall*, dan ia tidak berhak mendapatkan bagian sebelumnya untuk menyerahkan modal *shahibul mall*. Jika masih terdapat keuntungan, akan dibagi sesuai dengan kesepakatan.⁵⁴

7. Kedudukan *Mudharabah*

Kedudukan *mudharabah* berbeda-beda karena adanya perbedaan-perbedaan keadaan. Maka, kedudukan harta yang dijadikan modal dalam *mudharabah* juga tergantung pada keahliannya. Karena pengelola modal perdagangan mengelola modal tersebut atas izin pemilik harta, maka pengelola modal merupakan wakil pemilik barang tersebut dalam pengelolaannya, dan kedudukan modal adalah sebagai *wakalah'alaih* (objek *wakalah*). Ketika harta ditasharrufkan oleh pengelola, harta tersebut berada dibawah kekuasaan pengelola, sedangkan harta tersebut bukan miliknya,

⁵⁴ Ibid., Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*..., h. 144-155

sehingga harta tersebut kedudukannya sebagai amanat (titipan). Apabila harta itu rusak bukan karena kelalaian pengelola, ia tidak wajib menanggungnya.⁵⁵

Berdasarkan akad, *mudharabah* terdiri dari dua pihak. Bila ada keuntungan dalam pengelola uang, laba itu dibagi dua dengan presentase yang telah disepakati. Karena bersama-sama dalam keuntungan, maka *mudharabah* juga sebagai *syirkah*. Ditinjau dari segi keuntungan yang diterima oleh pengelola harta, pengelola mengambil upah sebagai bayaran dari tenaga yang dikeluarkan, sehingga *mudharabah* dianggap sebagai *ijarah* (upah mengupah atau sewa-menyewa). Apabila pengelola modal mengingkari ketentuan-ketentuan *mudharabah* yang telah disepakati dua belah pihak, maka telah terjadi kecacatan dalam *mudharabah*. Kecacatan yang terjadi menyebabkan pengelolaan dan penguasaan harta tersebut dianggap *ghasab*. *Ghasab* adalah *min al-kabir*.⁵⁶

8. Hal-hal Yang Membatalkan *Mudharabah*

Mudharabah menjadi batal apabila ada perkara-perkara sebagai berikut⁵⁷:

- a. Syarat yang ditentukan sudah tidak terpenuhi. Jika salah satu syarat *mudharabah* tidak terpenuhi, sedangkan modal sudah dipegang oleh pengelola dan sudah diperdagangkan maka pengelola mendapatkan sebagian keuntungan sebagai upah, karena tindakannya atas izin pemilik

⁵⁵ *Ibid*, Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, h.12.

⁵⁶ Abdurrahman al-Jaziri, *alFiqh 'Ala Madzahib al-Arba'ah*, (Beirut: Dar al-Qolam, t.th), h.42.

⁵⁷ Neneng Nurhasanah, *Mudarabah`Dalam Teori dan Praktik*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2015), h.76.

modal dan ia melakukan tugas berhak menerima upah. Jika terdapat keuntungan, maka keuntungan tersebut menjadi tanggungjawab pemilik modal karena pengelola adalah sebagai buruh yang hanya berhak menerima upah dan tidak bertanggungjawab sesuatu apapun kecuali atas kelalaiannya.

- b. Pengelola (*mudharib*) dengan sengaja meninggalkan tugasnya atau pengelola modal berbuat sesuatu yang bertentangan dengan tujuan akad.
- c. Apabila pelaksana atau pemilik modal (*shahibul mal*) meninggal dunia, maka *mudharabah* menjadi batal.

Disisi lain, Zuhaily mengatakan *mudharabah* akan dikatakan fasid jika terdapat salah satu syarat yang tidak terpenuhi, diantara bentuk *mudharabah* fasid, misalnya seseorang yang memiliki alat perburuan sebagai pemilik modal (*shahibul mal*) menawarkan kepada orang lain sebagai pengelola modal (*mudharib*) untuk berburu bersama-sama kemudian keuntungan dibagi sesuai dengan kesepakatan. Akad *mudharabah* ini fasid, *mudharib* tidak berhak mendapatkan keuntungan dari perburuan, keuntungan ini semuanya milik *shahibul mal*, *mudharib* hanya berhak mendapatkan keuntungan atas pekerjaan yang telah dilakukan.

Dengan alasan keuntungan yang didapatkan bersumber dari aset yang dimiliki oleh *shahibul mal*, *shahibul mal* harus menanggung beban kerugian yang ada. Dalam akad ini *mudharib* diposisikan sebagai ajir (orang disewa

tenaganya) dan *mudharib* berhak mendapatkan upah, baik ketika mendapatkan keuntungan maupun kerugian.⁵⁸

Selain ini dalam buku Rachmat Syafe'i, *mudharabah* dianggap berakhir pada hal berikut:

- a. Pembatalan, larangan berusaha, dan pemecatan.

Mudharabah menjadi batal dengan adanya pembatalan *mudharabah*, larangan mengusahakan, dan pemecatan. Semua ini jika memenuhi syarat pembatalan dan larangan yakni orang yang melakukan akad mengetahui pembatalan dan pemecatan tersebut, serta modal telah diserahkan ketika pembatalan dan pemecatan tersebut. akan tetapi, jika pengusaha tidak mengetahui bahwa *mudharabah* telah dibatalkan. *Mudharib* diperbolehkan untuk tetap mengusahakannya.

- b. Salah seorang *akid* meninggal dunia. Jumhur ulama berpendapat bahwa *mudharabah* batal jika salah seorang *akid* meninggal dunia, baik pemilik modal maupun pengelola. Hal ini karena *mudharabah* berhubungan dengan perwakilan yang akan batal dengan meninggalnya wakil atau yang mewakilkan. Pembatalan tersebut dipandang sempurna dan sah, baik diketahui salah seorang yang melakukan akad atau tidak.
- c. Salah seorang *akid* gila, jumhur ulama berpendapat bahwa gila membatalkan *mudharabah*, sebab gila atau sejenisnya membatalkan keahlian dalam *mudharabah*.

⁵⁸*Ibid*, Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, h.148.

- d. Pemilik modal *murtad*. Apabila pemilik modal *murtad* (keluar dari Islam) atau terbunuh dalam keadaan *murtad*, atau bergabung dengan musuh serta telah diputuskan oleh hakim atas pembelinya, menurut Imam Abu Hanifah, hal itu membatalkan *mudharabah* sebab bergabung dengan musuh sama saja dengan mati, hal ini menghilangkan keahlian dalam kepemilikan harta, dengan dalil bahwa harta orang *murtad* dibagikan diantara para ahli warisnya.
- e. Modal rusak ditangan pengelola. Jika harta itu rusak sebelum dibelanjakan, *mudharabah* menjadi batal, hal ini karena modal harus dipegang oleh pengelola.

Demikian juga *mudharabah* dianggap rusak jika modal diberikan kepada orang lain atau dihabiskan sehingga tidak tersisa untuk diusahakan.⁵⁹

9. Manfaat dan Hikmah Mudharabah

1) Manfaat *mudharabah*

- a. Bagi *mudharib*
- a) *Mudharib* tidak harus memiliki modal dalam bentuk uang atau barang, *mudharib* cukup memiliki keahlian dan kepiawaian dalam berusaha dan dapat menguasai peluang pasar saja sudah dapat berusaha. Ia tidak harus menyediakan modal.
- b) *Mudharib* dapat menikmati harga jual yang lebih rendah. Biaya bagi hasil hanya akan diperhitungkan setelah *mudharib* membukukan usahanya. Sehingga *mudharib* tidak menanggung beban tetap di awal.

⁵⁹ *Ibid.*, Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*...,h.2237

Biaya produksi, karena beban bagi hasil sangat tergantung dengan penjualan.

- c) *Mudharib* tidak akan membayar bagi hasil jika usahanya mengalami kerugian. Bahkan dengan bunga yang tidak memandang usaha anggota yang dibiayai.

b. Bagi *Shahibul mal*⁶⁰

- a) Mendapatkan pahala besar dari Allah, karena ia adalah penyebab lenyapnya kemiskinan dari orang-orang miskin. Karena, kalau tanpa dia orang-orang miskin tersebut akan tetap dalam kemiskinan. Akan tetapi pengelola harus memiliki keahlian dalam bekerja, agar keduanya saling bertukar kepentingan.
- b) Berkembangnya harta dan semakin banyaknya kekayaan akibat dari pengembangan bisnis yang dilakukan sesuai dengan bidangnya masing-masing.

2) Hikmah *Mudharabah*

Pada dasarnya, Islam telah membolehkan memberi keringanan kepada manusia untuk menggunakan uangnya dalam suatu usaha dalam bentuk kerjasama, seperti halnya *qiradh* atau *mudharabah*. Terkadang sebagian orang memiliki harta, tetapi tidak berkemampuan memproduktifitaskannya. Karena itu, syariat membolehkan muamalah ini supaya kedua belah pihak dapat mengambil manfaatnya.⁶¹

⁶⁰ *Ibid*, Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, h.34

⁶¹ Briefcase Book, *Konsep dan Implementasi Bank Syariah*, (Jakarta: Renasian, 2005), h.39.

Apabila Islam memusnahkan dan mencintai orang meng *qiradh* kan, makan dalam waktu yang sama sesungguhnya ia juga dibolehkan untuk orang yang diberikan *qiradh* atau *mudharabah* dan tidak menganggapnya sebagai yang makruh, karena dia mengambil harta atau menerima harta untuk dimanfaatkan dalam upaya menutupi kebutuhan-kebutuhan dan selanjutnya ia mengambil harta itu seperti sediakala.

Jadi, hikmah di syariatkannya *mudharabah* agar manusia dapat melakukan kerjasama dalam masalah perdagangan, karena hal itu juga termasuk saling tolong-menolong. Hal ini sebagaimana diterangkan dalam hadist yang sanatnya dari Abu Hurairah yang artinya: “Dari Abu Hurairah RA. Berkata, bahwa Rasulullah Saw telah bersabda:

مَنْ نَفَسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرَابِ الدُّنْيَا نَفَسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرَابِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَمَنْ يَسِّرْ عَلَى مُعْسِرٍ يَسِّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ

وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ⁶²

Artinya: “Barang siapa melapangkan seorang mukmin dari satu kesusahan dunia, Allah akan melapangkannya dari salah satu kesusahan di hari kiamat. Barang siapa meringankan penderitaan seseorang, Allah akan meringankan penderitaannya di dunia dan akhirat. Barang siapa menutupi (aib) seorang muslim, Allah akan menutupi (aib)nya di dunia dan akhirat. Allah akan menolong seorang hamba selama hamba itu mau menolong saudaranya.” (HR. Muslim dari Abu Hurairah).

Mudharabah mengandung hikmah yang besar dalam masyarakat, karena memupuk individu agar selalu memiliki sifat saling tolong-menolong dan jiwa gotong royong sesama anggota masyarakat. Selain itu,

⁶² Hamim Thohari Ibnu M. Dailimi, *Terjemahan Bulughul Maram*, (Bairut: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah), h.313.

hikmah disyariatkannya *mudharabah* yang dikehendaki oleh syar'i yang Maha bijaksana adalah untuk menghilangkan kekafiran dan untuk menjalin kasih sayang antara sesama manusia.

Selain itu, *mudharabah* merupakan salah satu perbuatan yang mendapat berkah, sebagaimana sabda Nabi Saw:

عَنْ صُحَيْبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : { ثَلَاثٌ فِيهِنَّ
الْبَرَكَهُ : الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ وَالْمُقَارَضَةُ وَخَلْطُ الْبَرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ } رَوَاهُ ابْنُ
مَاجَهٍ يَسْنَادٍ ضَعِيفٍ⁶³

Artinya: "Shuhaib ra. Telah menceritakan, bahwa Nabi saw pernah bersabda, "ada tiga macam perkara yang bertempo, meminjamkan modal, dan mencampurkan jewawut dengan gandum untuk dikonsumsi sendiri, bukan untuk diperjualbelikan".

Hadis di atas menjelaskan, bahwa orang yang mendapatkan berkah dalam bermuamalah adalah sebagai berikut⁶⁴ :

- a. Menjual sesuatu barang dengan mudah (tidak mempersulit pembeli)
- b. Tidak mencampurkan barang yang bagus dengan barang yang jelek, dalam arti yang lainnya (berbuat jujur).
- c. Memberikan modal kepada pihak lain, manakala dibutuhkan.

B. Tinjauan Pustaka

Penulis menyadari bahwa secara substansi penelitian yang diteliti ini bukanlah hal yang baru. Terdapat beberapa penelitian yang relevan dengan judul "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Sistem Bagi Hasil Dalam

⁶³ *Ibid*, Hamim Thohari Ibnu M. Dailimi, *Terjemahan Bulughul Maram*, h.314.

⁶⁴ Sohari Sahrani, Ru'fah Abdulah, *Fikih Muamalah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), h.190.

Kerja Sama Budi daya Lebah Madu Antara Pemodal Dengan Pengelola (Studi Pada Penangkaran Lebah Madu di Desa Tempel Rejo Kecamatan Kedondong Kabupaten Pesawaran)”. Adapun beberapa karya ilmiah yang pernah ditulis oleh penulis lain adalah sebagai berikut :

Elga Fadilia Naviri, Jurnal ini membahas tentang “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kerja sama Pertanian di Desa Beringin Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo”. Karya ilmiah tersebut mengambil Studi di Desa Beringin Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo. Jurnal ini membahas tentang penanggung kerugian dalam kerjasama tersebut.⁶⁵

Melinda, dalam jurnalnya yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Kerja sama Bagi Hasil Antara Pemodal Dengan Pengelola”. Karya ilmiah tersebut mengambil Studi pada Toko Wanti Pasar Panjang Bandar Lampung. Jurnal ini membahas tentang ketidaksesuaian dalam kerja sama bagi hasil tersebut, di mana terdapat pengalihan dan perubahan dan pengalihan hak dan kewajiban para pihak yang berakad, sedangkan tidak ada ketentuan tersebut di awal perjanjian.⁶⁶

Malia Udmatussolihah, Jurnal ini membahas tentang “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Akad Mudharabah Pada Bisnis Usaha Kecil Menengah”. Karya ilmiah tersebut mengambil Studi di Koperasi Keneke Kota Cilegon. Jurnal ini membahas tentang terdapatnya kerancuan dalam

⁶⁵ Elga Fadilia Naviri, Skripsi S1, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kerjasama Pertanian di Desa Beringin Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo*, (Ponorogo; institut Agama Islam Negeri Ponorogo).

⁶⁶ Melinda, Skripsi S1, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Kerjasama Bagi Hasil Antara Pemodal Dengan Pengelola (Studi pada Toko Wanti Pasar Panjang Bandar Lampung)*, (Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019).

kerjasama yang dilakukan oleh UKM, seperti UKM Koperasi Keneke dimana dalam UKM ini produk yang dipasarkan bergerak pada bidang kuliner atau makanan yang mengambil produk dari para pelaku usaha mikro sebagai supliernya tidak terdapatnya MOU yang jelas.⁶⁷

Setelah melihat ketiga karya ilmiah di atas terdapat beberapa perbedaan dengan penelitian ini, yaitu karya ilmiah ini berfokus pada sistem bagi hasil dalam kerja sama antara pemodal dengan pengelola di Desa Tempel Rejo Kecamatan Kedondong Kabupaten Pesawaran ini telah terjadinya pembagian hasil yang tidak sesuai dengan perjanjian lisan yang dibuat di awal hal itu dikarenakan terjadinya kegagalan panen sehingga pembagian hasilnya tidak seperti akad di awal. Dan inilah yang seakan menimbulkan samar-samar dan ketidakjelasan dalam seluk beluk dari operasional maupun mekanisme kerjanya.

Dan juga terdapat perbedaan dari segi pendekatan, penelitian ini menggunakan Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah sedangkan penelitian lain menggunakan Tinjauan Hukum Islam, Perbedaan lain terletak pada lokasi penelitian, dan tentunya dari objek penelitaian juga berbeda, penulis menggunakan objek penangkaran lebah madu sedangkan penelitian lain ada yang dibidang pertanian dan UKM.

⁶⁷ Malia Udmatussolihah, Skripsi S1, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Akad Mudharabah Pada Bisnis Usaha Kecil Menengah (Studi di Koperasi Keneke Kota Cilegon)*, (Banten: UIN SHM Banten, 2019).

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

A.Karim, Adiwarman, *Bank Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010.

Al-Muslih, Abdullah, *Fikih Keuangan Ekonomi Islam*, Jakarta: Darul Haq, 2008.

Al-Jaziri, Abdurrahman, *alFiqh 'Ala Madzahib al-Arba'ah*, Beirut: Dar al-Qolam, t.th, 2007.

Ali, Zainudin, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafindo, 2006.

Anshori, Abdul Ghafur, *Hukum Perjanjian Islam d Indonesia:Konsep, regulasi,dan Implementasi*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2010.

Antonio, M. Syafe'i, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, Jakarta: Gema Insani, 2001.

Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* Jakarta : Bima Aksara 1981.

Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007.

Ash Shiddieqy, Hasbi, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Jakarta: Bulan Bintang, 1974.

Az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu Jilid 5, terjemahan Abdul Hayyie al-Kattani*, Jakarta: Gema Insani, 2011.

- Azhar, Ahmad, *Azas-azas Hukum Muamalah Hukum Perdata Islam*, Yogyakarta: Pustaka Fakultas Hukum UII, 1990.
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Nadirsyah Hawari, 2010.
- Briefcase Book, *Konsep dan Implementasi Bank Syariah*, Jakarta: Renasian, 2005.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahan*, Bandung: CV Penerbit J-ART, 2014.
- Dewan Redaksi Ensiklopedia Hukum Islam, *Ensiklopedia Hukum Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1994.
- Djamil, Fathurrahman, *Penerapan Hukum Perjanjian Dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Mudharabah
- Hadi, Sutrisno, *Metode Research*, Jakarta: Fakultas Psikologi UGM, 1994.
- Hazam Al-Hadi, Abu, *Fikih Muamalah Kontemporer*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2017.
- Hajar Al-Asqolani, Ibnu, *Bulughul Marom Adilatil Ahkam*, Surabaya: Daarun Nasyr Al-mishriyah, 2009.
- Hidayat, Enang, *Fiqh jual beli*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015.

Huda, Nurul *Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoritis Dan Praktis*, Jakarta:

Kencana Prenada Media Group, 2010.

Jalaludin Muhammad, Al-Imam, et. Al., *Tafsir Jalalain*, Surabaya: PT. Elbah

Mandiri Sejahtera, 2012.

Jaziri, Abdurrahman, *Al-Fiqh Ala Madzahib Al-arba'ah Juz II*, Mesir: Tiariyah

Qubra, 2000.

Kamsir, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada,

2002.

Karim, Helmi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Raja Grafindo, 2002.

K.Lubis, Sahrawardi, *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2000.

M. Dailimi, Hamim Thohari Ibnu, *Terjemahan Bulughul Maram*, Bairut: Dar Al-

Kotob Al-Ilmiyah.

Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, Jakarta: Kencana, 2012.

Muhammad, Asad, *The Message of the Quran*, Gibraltar: Dar Al Andalus, 1985.

Musleihudin, Muhammad, *Sistem Perbankan Dalam Islam*, Jakarta: PT. Rineka

Cipta, 1994.

Mustafa, Imam, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, Jakarta: Rajawali Press, 2010.

Nawawi, Ismail *Fiqh Muamalah Hukum Ekonomi Bisnis dan Sosial*, Surabaya :

Putra Media Nusantara, 2010.

Nawawi, Ismail, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, Bogor: Ghalia

Indonesia, 2012.

Nurhasanah, Neneng , *Mudarabah`Dalam Teori dan Praktik*, Bandung: PT Refika Aditama, 2015.

Rokamah, Ridho, *al-Qawa'id al-Fiqiyyah*, Ponorogo: STAIN Po Press, 2014.

Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2017.

Sabiq, Sayyid, *Fiqih Sunnah*, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2004.

Saleh, Noer *Pedoman Membuat Skripsi*, Jakarta: Gunung Agung, 1989.

Shalih Bin Fauzan Bin Abdullah Al-Fauzan, *Ringkasan Fiqh Lengkap*, Jakarta: Darul Falah, 2005.

Soemitra, Andri, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah*, Jakarta: Prenada Media Grup, 2019.

Sohari Sahrani, Ru'fah Abdulah, *Fikih Muamalah*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.

Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta:PT Raja Grafindo,2002.

Sutrisno, *Metodelogi Research Kulitatif*, Bandung: R&D, 2009.

Susiadi, *Pedoman Penulisan Skripsi*, Bandar Lampung: pusat penelitian dan penerbitan LP2M Institusi Agama Islam Negeri Raden Intan Laampung, 2015.

Syafe'i, Rachmat, *Fiqih Muamalah* , Bandung: CV Pustaka Setia, 2001.

Syaihk Al-alamah, Shalih Bin Muhammad Alu asy-Syakh, *Tafsir Muyassah*, Jakarta:Darul Haq, 2016.

Syeh, Ismail Muhammad, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 1999.

Yakup, Hamzah, *Kode Etik Dagang Menurut Islam*, Bandung: CV Diponegoro, 1984.

Journal:

Hasni Ahmad Said & Faturrahman Rauf, *Radikalisme Agama Dalam Perspektif Hukum Islam*, *Al-'Adalah Jurnal Hukum Islam*, Fakultas Syari'ah UIN RIL., Vol.XII, No.3, Juni 2015.

Wawancara:

Agus Sucipto, pemodal, *Wawancara*, Tanggal 20 Januari 2021

Anton, warga Desa Tempel Rejo, *Wawancara*, Tanggal 20 Januari 2021.

Boniran, pemodal, *Wawancara*, Tanggal 20 Januari 2021

Gustiawan, warga Desa Tempel Rejo, *Wawancara*, Tanggal 20 Januari 2021

Hamidi, pemodal, *Wawancara*, Tanggal 20 Januari 2021

Handoko, pengelola, *Wawancara*, Tanggal 20 Januari 2021

Ismail, pemodal, *Wawancara*, Tanggal 20 Januari 2021

Ruslan, pemodal, *Wawancara*, Tanggal 20 Januari 2021

Rafiudin, warga Desa Tempel Rejo, *Wawancara*, 20 Januari 2021

Sucipto, pengelola, *Wawancara*, Tanggal 20 Januari 2021

Sudirman, pemodal, *Wawancara*, Tanggal 20 Januari 2021

Sugeng, warga Desa Tempel Rejo, *Wawancara*, Tanggal 20 Januari 2021

Yanti, warga Desa Tempel Rejo, *Wawancara*, Tanggal 20 Januari 2021.

Widi, pengelola, *Wawancara*, Tanggal 20 Januari 2021

Website:

<http://kbbi.web.id/budidaya>. (16 Juni 2020).

<http://id.m.wikipedia.org/wiki/Madu>. (16 Juni 2020).

<http://pengusahamuslim.com/3833-al-mudharabah-bagi-hasil-sebagai-solusi-perekonomian-islam.html/>. (24 November 2020).

Surat Perjanjian Kerja Sama Gaduhan, (Online), Tersedia di

<http://kttsaraswati.blogspot.co.id/2013/04/surat-perjanjian-kerjasama-gaduhan.html/m=1> (18 Februari 2021)

